

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### I. KESIMPULAN

Obyektivitas pemberitaan adalah suatu penyajian berita yang benar dan tidak berpihak. Suatu pemberitaan baru dapat dikatakan obyektif jika sudah memenuhi standar jurnalistik yang menekankan pada berita sebagai fakta obyektif. Dalam hal ini, surat kabar Republika dapat dikatakan sebagai surat kabar yang lebih obyektif bila dibandingkan dengan Kompas mengenai pemberitaan Rakernas PDI Perjuangan. Hal ini dapat dibandingkan dari fakta sosiologis ada atau tidaknya pencampuran antara fakta dan opini, dramatisasi berita dan lainnya melalui skema obyektivitas Westersthall, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mc Quail dengan indikatornya yaitu *truth*, akurasi, relevansi, *neutrality* dan *balance*. Peneliti kemudian membagi analisis obyektivitas menjadi beberapa bagian sesuai dengan indikator dari skema obyektivitas tersebut. Bagian-bagian tersebut adalah berdasarkan faktualitas dimensi kognitif, yaitu *truth*. *Truth* dibagi menjadi dua indikator yaitu fakta sosiologis dan fakta psikologis. Untuk hal ini, kedua surat kabar sama-sama lebih cenderung mengungkap berita melalui fakta sosiologis yang ada, dimana bahan baku berita yang ada merupakan kejadian nyata dan faktual. Jika dilihat dari akurasi berita yang disajikan, kedua surat kabar ini telah menerapkan cek dan ricek pada sebagian besar berita yang ada. Pada berita yang dituliskan oleh Republika dan Kompas memiliki nilai berita yang berbeda, dimana Kompas cenderung memiliki nilai berita yang *magnitude*,

besaran fakta yang berkaitan dengan angka-angka yang berarti, atau fakta yang berakibat bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik bagi pembaca. Sedangkan Republika cenderung memiliki nilai berita yang *significance*, mempengaruhi hidup dari khalayak atau pembacanya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa peristiwa Rakernas PDI Perjuangan ini merupakan salah satu peristiwa yang dianggap cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Pemberitaan dikatakan obyektif apabila berita yang disajikan dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak mengganggu perasaan dan pendapat pembaca. Selain surat kabar yang baik juga harus menyajikan peristiwa apa adanya tanpa adanya pencampuran opini dengan fakta, kesesuaian judul berita dengan isinya, dan tidak adanya dramatisasi (*neutrality*). Pencampuran opini dengan fakta masih terlihat dengan jelas pada Republika, sedangkan Kompas telah mampu cukup obyektif dengan tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Kemudian, Republika dan Kompas juga sama-sama telah berhasil menyesuaikan antara judul dan isi berita yang ada. Namun dalam pemberitaannya, Kompas Pos masih cenderung memberikan dramatisasi pada berita yang disajikan. Dan disamping itu, kedua surat kabar dinilai tidak berimbang dalam meliput narasumber dan evaluasinya. Dalam meliput narasumber, Republika dan Kompas banyak menampilkan *cover both sides*.

Berdasarkan dari data yang telah dianalisis oleh peneliti pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa Surat Kabar Republika bertindak lebih obyektif dalam pemberitaannya menyangkut pemberitaan mengenai agenda politik Rakernas PDI Perjuangan 2009. Dan surat kabar Kompas dinilai tidak obyektif dalam

pemberitaannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data-data yang telah diteliti oleh peneliti dimana pada Kompas masih terdapat adanya pencampuran antara fakta dengan opini, dramatisasi hampir pada setiap berita dan adanya ketidakseimbangan dalam meliput narasumber.

## II. SARAN

Obyektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Dari segi faktualitas, berita yang disuguhkan harus dapat dipercaya, tidak mengganggu perasaan dari khalayak pembacanya. Dan surat kabar yang baik harus dapat menyampaikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan suatu pertanyaan. Selain itu suatu karya jurnalistik juga harus menghindari adanya imparsialitas dalam pemberitaannya sehingga tidak menimbulkan adanya keberpihakan pada siapapun atau kesan apapun yang ditimbulkan pada khalayak pembacanya. Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemberitaan Rakernas PDI Perjuangan pada Kompas dan Republika periode 25 s/d 31 Januari 2009, ternyata kedua surat kabar tersebut masih cenderung kurang objektif dalam pemberitaannya, namun Republika masih lebih objektif bila dibandingkan dengan Kompas. Adapun saran yang dapat peneliti disampaikan bagi kedua surat kabar adalah:

Dalam hal *truth*, semoga kedua surat kabar tetap mempertahankan objektivitas berita dengan tetap menampilkan fakta sosiologis secara lebih dominan. Karena dalam suatu berita yang obyektif, tidak ada pencampuran

pendapat dari wartawan. Kedua surat kabar lebih memperhatikan mengenai *check and recheck* yang ada. Khususnya kepada surat kabar Kompas, karena dalam penelitian kali ini Kompas kurang memperhatikan *check and recheck* yang ada. Mempertahankan pemberitaan surat kabar masing-masing sesuai dengan relevansi berita yang ada. Kedua surat kabar ini tentunya memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan unsur relevansi apa yang akan diangkat sehingga mampu menarik minat dari para pembaca mengenai kasus tertentu. Berita yang objektif seharusnya tidak terdapat pencampuran antara fakta dan opini, namun berdasarkan penelitian ini masih didapatkan adanya pencampuran fakta dan opini oleh kedua surat kabar. Seharusnya kedua surat kabar tersebut mampu memisahkan antara fakta dan opini, khususnya untuk surat kabar Jawa Pos yang masih memiliki angka pencampuran fakta dan opini yang tinggi. Kedua surat kabar diharapkan mampu mempertahankan kesesuaian judul dengan isi berita seperti yang telah dilakukan selama ini. Akan lebih baik lagi apabila dalam pemberitaan yang ada tidak ada unsur dramatisasi yang berlebihan. Khususnya untuk surat kabar Kompas memiliki angka dramatisasi yang cukup tinggi.

Melalui penelitian ini pula diharapkan bahwa kedua surat kabar mampu menyajikan pemberitaan yang *cover both side*. Dimana dalam suatu berita menampilkan komentar dari semua pihak berkepentingan dengan porsi yang sama. Pada penelitian ini kedua surat kabar cenderung memberikan porsi yang kurang adil bagi pihak-pihak yang ada. Peneliti menyarankan dan berharap kepada seluruh surat kabar di Indonesia agar menerapkan keobyektifan dalam setiap pemberitaannya, khususnya kepada Republika dan Kompas.



Selain itu peneliti juga menghimbau agar pada penelitian berikutnya, penelitian dengan memakai konsep objektivitas ini menjadi lebih berkembang menjadi penelitian kualitatif dengan metode *discourse analysis*. Atau adanya perubahan pada objek yang diteliti seperti penggunaan media online sebagai objek pengganti surat kabar sebagai penghargaan terhadap kemajuan media komunikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abramson, Jeffrey B. *Four Criticisms Of Press Ethics* dalam Judith Lichtenberg (editor), *Democracy and The Mass Media*, Cambridge University Press, New York, 1990
- Abrar, A Nadya, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- Assegaff, Dja, far .H, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Basuki, M,. *Teknik Mencari dan Menulis Berita*, Universitas Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 1983
- Bond, F. Fraser, *Introduction to Journalism*, Mac Millan Company, USA, 1961.
- Flournoy, D, Michael (ed), *Analisis Isi Surat Kabar Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985
- Hasrullah, Megawati (dalam Tangkapan Pers). Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Manning,Raul.*News and News Sources: A Critical Introduction*, London : Sage Publication,2001.
- Mc. Quails, D,. *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Nimmo, Dan,. *Komunikasi Politik*, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- Oetama, J,. *Pers Sebagai Lembaga Kemasyarakatan*, dalam T. Admadi (editor), *Bunga Rampai Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia*, PT. Pantja Simpati, Jakarta, 1985.
- Panuju, Redi,. *Telaah Politik Untuk Studi Komunikasi*, Lembaga Penerbitan Fakultas Ilmu Komunikasi UNITOMO, Surabaya, 1991.
- Prajarto, N,. *Media Berita Dalam Sebuah Konflik*, Fisipol UGM Yogyakarta, 1993
- Rakhmat, Djalalludin,. (penyunting), *Psikologi Komunikasi Massa*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 1992.
- Rivers, William L. & Mathews, Cleve,. *Etika Media Massa Dan Kecenderungan Untuk Melanggarnya*, edisi terjemahan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Setiawan, Bambang. *Content Analysis*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1983.

Siregar, Ashadi, PERS, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1992.

Sudibyoy, Agus. Kabar-kabar kebencian ( Prasangka Agama di Media Massa), Jakarta: ISAI, 2001.

Sumadiria, AS Haris, *Jurnalistik Indonesia (Menulis Berita dan Feature)*, Bandung: Rekatama Media, 2006.

Suwardi, H., *Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1993

Uchjana, Onong,. *Spektrum Komunikasi*, Remadja Rosdakarya, Bandung, 1992

Uchjana, Onong,. *Ilmu, Teori dan Filasafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Wahyudi,J.B, Drs. *Komunikasi Jurnalistik*, Alumni Bandung, 1991.

Wonohito, M, *Berita, Sifatnya, Mencarinya, Menyusunnya*, BP. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 1960

#### **INTERNET**

<http://www.kapanlagi.com/h/old/0000175481.html> - ( Juni 2007)

<http://www.beritaindonesia.co.id/berita-utama/pemilu-2009-yang-memerdekakan/page-4> (agustus 2009)



# LAMPIRAN

## HASIL UJI RELIABILITAS PENELITIAN

### 1. Hasil Uji Reliabilitas untuk kategori berdasarkan Sifat Berita.

#### a. Pengkoding I

##### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11+11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Perhitungan ini belum memperhitungkan persetujuan karena peluang. Oleh karena itu digunakan rumus Scott. Caranya dengan menentukan persetujuan yang diharapkan karena peluang, dengan menghitung frekuensi dan proporsi pernyataan yang dikoding oleh pengkoding I, kemudian masing-masing proporsi kategori dikuadratkan.

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	6	0,54
Fakta Psikologis	11	0,45

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,54^2 + 0,45^2 = 0,4941$$

$$= \frac{0,91 - 0,4941}{1 - 0,4941} = \frac{0,42}{0,51}$$

$$= 0,82$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	4	0,66
Fakta Psikologis	2	0,34

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,66^2 + 0,34^2 = 0,4356 + 0,1156 = 0,6097$$

$$= \frac{0,83 - 0,60}{1 - 0,60} = \frac{0,23}{0,40}$$

$$= 0,57$$

## Pengkoding II

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	6	0,54
Fakta Psikologis	11	0,45

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,54^2 + 0,45^2$$

$$= 0,2916 + 0,2025 = 0,49$$

$$= \frac{0,90 - 0,49}{1 - 0,49} = \frac{0,41}{0,51}$$

$$= 0,81$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	4	0,66
Fakta Psikologis	2	0,34

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,66^2 + 0,34^2$$

$$= 0,4356 + 0,1156 = 0,61$$

$$= \frac{0,83 - 0,61}{1 - 0,61} = \frac{0,22}{0,39}$$

$$= 0,564$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori Sifat Berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,82 + 0,81}{2} = 0,815$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,815 atau 81,5%.

$$\text{Republika} = \frac{0,57 + 0,61}{2} = 0,59$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.59 atau 59%.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Akurasi Berita.

### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Akurasi Berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Perhitungan ini belum memperhitungkan persetujuan karena peluang. Oleh karena itu digunakan rumus Scott. Caranya dengan menentukan persetujuan yang diharapkan karena peluang, dengan menghitung frekuensi dan proporsi pernyataan yang dikoding oleh pengkoding I, kemudian masing-masing proporsi kategori dikuadratkan.

Akurasi Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>check and recheck</i>	8	0,72
Tanpa <i>check and recheck</i>	3	0,28

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,72^2 + 0,28^2$$

$$= 0,5184 + 0,0784$$



$$= 0,5968$$

$$= \frac{0,81 - 0,59}{1 - 0,59} = \frac{0,22}{0,41}$$

$$= 0,53$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori akurasi berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Akurasi Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>check and recheck</i>	5	0,83
Tanpa <i>check and recheck</i>	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,83^2 + 0,16^2$$

$$= 0,6889 + 0,0256$$

$$= 0,7145$$

$$= \frac{0,81 - 0,72}{1 - 0,72} = \frac{0,09}{0,28}$$

$$= 0,32$$

### a) Pengkoding II

### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori akurasi berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Akurasi Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>check and recheck</i>	9	0,82
Tanpa <i>check and recheck</i>	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,82^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,6724 + 0,0324 \\
 &= 0,7048 \\
 &= \frac{0,81 - 0,70}{1 - 0,70} = \frac{0,11}{0,3} \\
 &= 0,36
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori akurasi Berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6+6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Akurasi Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>check and recheck</i>	4	0,67
Tanpa <i>check and recheck</i>	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,67^2 + 0,33^2 \\
 &= 0,4489 + 0,1089 \\
 &= 0,5578
 \end{aligned}$$

$$= \frac{0,83 - 0,55}{1 - 0,55} = \frac{0,28}{0,45}$$

$$= 0,62$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori akurasi berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,53 + 0,36}{2} = 0,71$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,71 atau 71%.

$$\text{Republika} = \frac{0,32 + 0,62}{2} = 0,63$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,6362 atau 63%.

### 3. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Relevansi Berita.

#### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Relevansi Berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11 + 11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliabilitynya adalah 0,81.

Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,81 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott sebagai berikut:

$$P_i = \frac{\% \text{ observed agreement} - \% \text{ expected agreement}}{1 - \% \text{ expected agreement}}$$

Relevansi / Nilai Berita	Frekuensi	Proporsi
Tinggi	7	0,64
Menengah	3	0,27
Rendah	1	0,09

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,64^2 + 0,27^2 + 0,09^2 \\
 &= 0,4096 + 0,0729 + 0,0081 \\
 &= 0,4906 \\
 &= \frac{0,81 - 0,49}{1 - 0,49} = \frac{0,32}{0,51} \\
 &= 0,62
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori relevansi berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Relevansi / Nilai Berita	Frekuensi	Proporsi
Tinggi	4	0,67
Menengah	2	0,34
Rendah		-

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,67^2 + 0,34^2 \\
 &= 0,4489 + 0,1156 \\
 &= 0,5645 \\
 &= \frac{1 - 0,56}{1 - 0,56} = \frac{0,44}{0,44} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$1 - 0,56 = 0,44$$

$$= 1$$

## b) Pengkoding II

### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori relevansi berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Relevansi / Nilai Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Tinggi	6	0,55
Menengah	4	0,36
Rendah	1	0,09

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,55^2 + 0,36^2 + 0,09^2$$

$$= 0,3025 + 0,1296 + 0,0081$$

$$= 0,4402$$

$$= \frac{0,91 - 0,44}{1 - 0,44} = \frac{0,47}{0,56}$$

$$= 0,83$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori akurasi Berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliability)nya adalah 0,83. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,81 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Relevansi / Nilai Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Tinggi	3	0,5
Menengah	2	0,34
Rendah	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,5^2 + 0,34^2 + 0,16^2 \\
 &= 0,25 + 0,1156 + 0,0256 \\
 &= 0,3912 \\
 &= \frac{0,83 - 0,39}{1 - 0,39} = \frac{0,44}{0,61} \\
 &= 0,72
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori relevansi berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,62 + 0,83}{2} = 0,725$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,725 atau 72,5%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,72}{2} = 0,6361$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,86 atau 86%.

#### 4. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Netralitas Berita.

##### Pengkoding I

##### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0.81$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliabilitynya adalah 0,81. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,81 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	3	0,27
Kesesuaian Judul Berita Dan Isi	6	0,55
Dramatisasi	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,27^2 + 0,55^2 + 0,18^2$$

$$= 0,072 + 0,303 + 0,032$$

$$= 0,407$$

$$= \frac{0,81 - 0,40}{1 - 0,40} = \frac{0,41}{0,60}$$

$$= 0,69$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	2	0,33
Kesesuaian Judul Berita Dan Isi	3	0,50
Dramatisasi	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,33^2 + 0,50^2 + 0,16^2$$

$$= 0,109 + 0,25 + 0,256$$

$$= 0,38$$

$$= \frac{1 - 0,38}{1 - 0,38} = \frac{0,62}{0,62}$$

$$= 1$$

### c) Pengkoding II

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$



Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	2	0,18
Kesesuaian	7	0,63
Judul Berita Dan Isi		
Dramatisasi	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,18^2 + 0,63^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,032 + 0,396 + 0,032 \\
 &= 0,460 \\
 &= \frac{0,91 - 0,46}{1 - 0,46} = \frac{0,45}{0,56} \\
 &= 0,80
 \end{aligned}$$

#### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori netralita berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	1	0,16
Kesesuaian	4	0,66
Judul Berita Dan Isi		
Dramatisasi	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,16^2 + 0,66^2 + 0,16^2 \\
 &= 0,02 + 0,43 + 0,02 \\
 &= 0,47 \\
 &= \frac{0,83 - 0,47}{1 - 0,47} = \frac{0,36}{0,53} = 0,67
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori netralitas berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,69 + 0,80}{2} = 0,745$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,745 atau 74,5%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,67}{2} = 0,835$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.835 atau 83,5%.

#### 5. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Balance Berita.

Balance	Kompas	Republika	Jumlah
<i>Cover Both Side</i>	7 (41,6%)	3 (17,64%)	10 (58,8%)
Berimbang	4 (23,52%)	3 (17,64%)	7 (41,16%)
Jumlah	11 (64,68%)	6 (35,28%)	17 (100%)

#### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori balance berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$\text{CR} = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Balance Berita	Frekuensi	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	7	0,63
Berimbang	4	0,37

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,63^2 + 0,37^2$$

$$= 0,39 + 0,13$$

$$= 0,52$$

$$= \frac{0,81 - 0,52}{1 - 0,52} = \frac{0,29}{0,48}$$

$$= 0,60$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori balance berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Balance Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	4	0,66
Berimbang	2	0,34

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,66^2 + 0,34^2$$

$$= 0,44 + 0,11$$

$$= 0,55$$

$$= \frac{0,83 - 0,55}{1 - 0,55} = \frac{0,28}{0,45}$$

$$= 0,63$$

#### d) Pengkoding II

##### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Balance Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	8	0,73
Berimbang	3	0,27

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,73^2 + 0,27^2$$

$$= 0,53 + 0,07$$

$$= 0,6$$

$$= \frac{0,91 - 0,60}{1 - 0,60} = \frac{0,31}{0,40}$$

$$= 0,77$$

##### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori netralita berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Balance Berita	Frekuensi	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	3	0,50
Berimbang	3	0,50

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,50^2 + 0,50^2$$

$$= 0,25 + 0,25$$

$$= 0,50$$

$$= \frac{0,83 - 0,50}{1 - 0,50} = \frac{0,33}{0,50}$$

$$= 0,66$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori netralitas berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,60 + 0,77}{2} = 0,685$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,685 atau 68,5%.

$$\text{Republika} = \frac{0,63 + 0,66}{2} = 0,645$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,645 atau 64,5%.

6. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Sumber Berita.

**Pengkoding I**

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11+11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefsisient Reliabilitynya adalah 0,90. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,09
Eksternal Partai (EP)	2	0,18
Intelektual (I)	1	0,09
Sumber Lain (SL)	2	0,18
IP & EP	4	0,36
EP & I	1	0,09

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned} &= 0,09^2 + 0,18^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,36^2 + 0,09^2 \\ &= 0,0081 + 0,0324 + 0,0081 + 0,0324 + 0,1296 + 0,0081 \\ &= 0,218 \\ &= \frac{0,90 - 0,21}{1 - 0,21} = \frac{0,69}{0,79} \\ &= 0,87 \end{aligned}$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,16
IP & EP	3	0,50
EP & I	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,16^2 + 0,50^2 + 0,16^2$$

$$= 0,256 + 0,25 + 0,256$$

$$= 0,76$$

$$= \frac{1 - 0,76}{1 - 0,76} = \frac{0,24}{0,24} = 1$$

### e) Pengkoding II

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,09
Eksternal Partai (EP)	2	0,18
Intelektual (I)	1	0,09
Sumber Lain (SL)	2	0,18
IP & EP	3	0,27
EP & I	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,09^2 + 0,18^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,27^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,0081 + 0,0324 + 0,0081 + 0,0324 + 0,0729 + 0,0324 \\
 &= 0,179 \\
 &= \frac{0,91 - 0,18}{1 - 0,18} = \frac{0,73}{0,82} \\
 &= 0,89
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,16
IP & EP	4	0,66
EP & I	1	0,16



Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,16^2 + 0,66^2 + 0,16^2$$

$$= 0,02 + 0,43 + 0,02$$

$$= 0,47$$

$$= \frac{0,83 - 0,47}{1 - 0,47} = \frac{0,36}{0,53}$$

$$= 0,67$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori sumber berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,87 + 0,89}{2} = 0,88$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,88 atau 88%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,67}{2} = 0,835$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.835 atau 83,5%.

## 7. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Ragam Berita

### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori ragam berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliabilitynya adalah 0,90. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	8	0,72
Berita Ringan	1	0,09
Kolom	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,72^2 + 0,09^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,518 + 0,0081 + 0,0324 \\
 &= 0,57 \\
 &= \frac{0,90 - 0,57}{1 - 0,57} = \frac{0,33}{0,43} \\
 &= 0,76
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori ragam berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	5	0,83
Berita Ringan	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,83^2 + 0,16^2 \\
 &= 0,688 + 0,256
 \end{aligned}$$

$$= 0,944$$

$$= \frac{1 - 0,94}{1 - 0,94} = \frac{0,06}{0,06}$$

$$= 1$$

#### f) Pengkoding II

##### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori ragam berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	7	0,63
Berita Ringan	2	0,18
Kolom	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,63^2 + 0,18^2 + 0,18^2$$

$$= 0,3969 + 0,0324 + 0,0324$$

$$= 0,4617$$

$$= \frac{0,91 - 0,46}{1 - 0,46} = \frac{0,45}{0,54}$$

$$= 0,83$$

##### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	4	0,67
Berita Ringan	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,67^2 + 0,33^2 \\
 &= 0,4489 + 0,1089 \\
 &= 0,57 \\
 &= \frac{0,83 - 0,57}{1 - 0,57} = \frac{0,26}{0,43} \\
 &= 0,61
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori sumber berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\mathbf{SKH Kompas} = \frac{0,76 + 0,83}{2} = 0,795$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,795 atau 79,5%.

$$\mathbf{Republika} = \frac{1 + 0,61}{2} = 0,805$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.805 atau 80,5%.

## 8. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Materi Berita

### Pengkoding I

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11+11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisien Reliabilitasnya adalah 0,90. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	2	0,18
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	1	0,09
Lain-lain	4	0,36
Kombinasi...dan...;	4	0,36

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned} &= 0,18^2 + 0,09^2 + 0,36^2 + 0,36^2 \\ &= 0,0324 + 0,0081 + 0,1296 + 0,1296 \\ &= 0,2997 \\ &= \frac{0,90 - 0,29}{1 - 0,29} = \frac{0,61}{0,71} \\ &= 0,85 \end{aligned}$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Manuver-manuver politik PDI Perjuangan	1	0,17
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	1	0,17
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	1	0,17
Lain-lain	2	0,33
Kombinasi...dan...;	1	0,17

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned} &= 0,17^2 + 0,17 + 0,17^2 + 0,33^2 + 0,17^2 \\ &= 0,0289 + 0,0289 + 0,0289 + 0,1089 + 0,0289 \\ &= 0,2245 \\ &= \frac{1 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,78}{0,78} \\ &= 1 \end{aligned}$$

### g) Pengkoding II

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Manuver-manuver politik PDI Perjuangan	1	0,09
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	2	0,18
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	1	0,09
Lain-lain	3	0,27
Kombinasi...dan...;	4	0,36

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,09^2 + 0,18^2 + 0,09^2 + 0,27^2 + 0,36^2 \\
 &= 0,0081 + 0,0324 + 0,0081 + 0,0729 + 0,1296 \\
 &= 0,26 \\
 &= \frac{0,91 - 0,26}{1 - 0,26} = \frac{0,65}{0,74} \\
 &= 0,87
 \end{aligned}$$

#### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Manuver-manuver politik PDI Perjuangan	1	0,17
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	1	0,17
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	2	0,33
Lain-lain	1	0,17
Kombinasi...dan...;	1	0,17

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned} &= 0,17^2 + 0,17 + 0,33^2 + 0,17^2 + 0,17^2 \\ &= 0,0289 + 0,0289 + 0,1089 + 0,0289 + 0,0289 \\ &= 0,2245 \\ &= \frac{0,83 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,61}{0,78} \\ &= 0,78 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori materi berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,85 + 0,87}{2} = 0,86$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,86 atau 86%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,78}{2} = 0,89$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,89 atau 89%.

## 9. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Kecenderungan Fungsi Item Informasi.

### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 10 item berita



$$CR = \frac{2 \times 10}{11+11} = \frac{20}{22} = 0.90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliabilitynya adalah 0,90 Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,09
Alat ukur pendapat umum	5	0,45
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum	1	0,09
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,09^2 + 0,45^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,0081 + 0,2025 + 0,0081 + 0,0324 + 0,0324 \\
 &= 0.29 \\
 &= \frac{0,90 - 0,29}{1 - 0,29} = \frac{0,61}{0,71} \\
 &= 0,85
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,17
Alat ukur pendapat umum	1	0,17
Alat ukur pendapat umum - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,17
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,17
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,17^2 + 0,17 + 0,17^2 + 0,17^2 + 0,33^2 \\
 &= 0.0289 + 0.0289 + 0.0289 + 0.0289 + 0.1089 \\
 &= 0,2245 \\
 &= \frac{0,83 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,61}{0,78} \\
 &= 0,78
 \end{aligned}$$

#### **h) Pengkoding II**

##### **SKH KOMPAS**

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,09
Alat ukur pendapat umum	4	0,36
Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,09
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum	1	0,09
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,09^2 + 0,36^2 + 0,09^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,0081 + 0,1296 + 0,0081 + 0,0081 + 0,0324 + 0,0324 \\
 &= 0,22 \\
 &= \frac{0,91 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,69}{0,78} \\
 &= 0,88
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,17
Alat ukur pendapat umum	1	0,17
Alat ukur pendapat umum - Alat bagi yang	1	0,17

mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar		
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,17
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,17^2 + 0,17 + 0,17^2 + 0,17^2 + 0,33^2 \\
 &= 0,0289 + 0,0289 + 0,0289 + 0,0289 + 0,1089 \\
 &= 0,2245
 \end{aligned}$$

$$= \frac{0,83 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,61}{0,78} = 0,78$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori

Kecenderungan Fungsi Item Informasi untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,85 + 0,88}{2} = 0,86$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,86 atau 86%.

$$\text{Republika} = \frac{0,78 + 0,78}{2} = 0,78$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.78 atau 78%.

## HASIL UJI RELIABILITAS PENELITIAN

### 10. Hasil Uji Reliabilitas untuk kategori berdasarkan Sifat Berita.

#### b. Pengkoding I

##### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11+11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Perhitungan ini belum memperhitungkan persetujuan karena peluang. Oleh karena itu digunakan rumus Scott. Caranya dengan menentukan persetujuan yang diharapkan karena peluang, dengan menghitung frekuensi dan proporsi pernyataan yang dikoding oleh pengkoding I, kemudian masing-masing proporsi kategori dikuadratkan.

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	6	0,54
Fakta Psikologis	11	0,45

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,54^2 + 0,45^2 = 0,4941$$

$$= \frac{0,91 - 0,4941}{1 - 0,4941} = \frac{0,42}{0,51}$$

$$= 0,82$$

##### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6+6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

$$6 + 6 = 12$$

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	4	0,66
Fakta Psikologis	2	0,34

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,66^2 + 0,34^2 = 0,4356 + 0,1156 = 0,6097$$

$$= \frac{0,83 - 0,60}{1 - 0,60} = \frac{0,23}{0,40}$$

$$= 0,57$$

### **Pengkoding II**

### **SKH KOMPAS**

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	6	0,54
Fakta Psikologis	11	0,45

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,54^2 + 0,45^2$$

$$= 0,2916 + 0,2025 = 0,49$$

$$= \frac{0,90 - 0,49}{1 - 0,49} = \frac{0,41}{0,51}$$

$$= 0,81$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Sifat Berita diperoleh persamaan  $(M) = 5$  item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Sifat Berita	Frekuensi	Proporsi
Fakta Sosiologis	4	0,66
Fakta Psikologis	2	0,34

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned} &= 0,66^2 + 0,34^2 \\ &= 0,4356 + 0,1156 = 0,61 \\ &= \frac{0,83 - 0,61}{1 - 0,61} = \frac{0,22}{0,39} \\ &= 0,564 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori Sifat Berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,82 + 0,81}{2} = 0,815$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,815 atau 81,5%.

$$\text{Republika} = \frac{0,57 + 0,61}{2} = 0,59$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.59 atau 59%.

## 11. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Akurasi Berita.

### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Akurasi Berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Perhitungan ini belum memperhitungkan persetujuan karena peluang. Oleh karena itu digunakan rumus Scott. Caranya dengan menentukan persetujuan yang diharapkan karena peluang, dengan menghitung frekuensi dan proporsi pernyataan yang dikoding oleh pengkoding I, kemudian masing-masing proporsi kategori dikuadratkan.

Akurasi Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>check and recheck</i>	8	0,72
Tanpa <i>check and recheck</i>	3	0,28

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,72^2 + 0,28^2$$

$$= 0,5184 + 0,0784$$

$$= 0,5968$$

$$= \frac{0,81 - 0,59}{1 - 0,59} = \frac{0,22}{0,41}$$

$$= 0,53$$

### **SKH REPUBLIKA**

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori akurasi berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6+6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

$$6 + 6 = 12$$



Akurasi Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>check and recheck</i>	5	0,83
Tanpa <i>check and recheck</i>	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,83^2 + 0,16^2$$

$$= 0,6889 + 0,0256$$

$$= 0,7145$$

$$= \frac{0,81 - 0,72}{1 - 0,72} = \frac{0,09}{0,28}$$

$$= 0,32$$

#### i) Pengkoding II

##### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori akurasi berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Akurasi Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>check and recheck</i>	9	0,82
Tanpa <i>check and recheck</i>	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,82^2 + 0,18^2$$

$$= 0,6724 + 0,0324$$

$$= 0,7048$$

$$= \frac{0,81 - 0,70}{1 - 0,70} = \frac{0,11}{0,3}$$

$$= 0,36$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori akurasi Berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Akurasi Berita	Frekuensi	Proporsi
<i>check and recheck</i>	4	0,67
Tanpa <i>check and recheck</i>	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,67^2 + 0,33^2$$

$$= 0,4489 + 0,1089$$

$$= 0,5578$$

$$= \frac{0,83 - 0,55}{1 - 0,55} = \frac{0,28}{0,45}$$

$$= 0,62$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori akurasi berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,53 + 0,36}{2} = 0,71$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,71 atau 71%.

$$\text{Republika} = \frac{0,32 + 0,62}{2} = 0,63$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,6362 atau 63%.

## 12. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Relevansi Berita.

### Pengkoding I

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Relevansi Berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0.81$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisien Reliabilitasnya adalah 0,81. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,81 disebut *observed agreement* (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott sebagai berikut:

$$P_i = \frac{\% \text{observed agreement} - \% \text{expected agreement}}{1 - \% \text{expected agreement}}$$

Relevansi / Nilai Berita	Frekuensi	Proporsi
Tinggi	7	0,64
Menengah	3	0,27
Rendah	1	0,09

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,64^2 + 0,27^2 + 0,09^2$$

$$= 0,4096 + 0,0729 + 0,0081$$

$$= 0,4906$$

$$= \frac{0,81 - 0,49}{1 - 0,49} = \frac{0,32}{0,51}$$

$$= 0,62$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori relevansi berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6+6} = \frac{12}{12} = 1$$

$$6 + 6 = 12$$

Relevansi / Nilai Berita	Frekuensi	Proporsi
Tinggi	4	0,67
Menengah	2	0,34
Rendah		-

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,67^2 + 0,34^2$$

$$= 0,4489 + 0,1156$$

$$= 0,5645$$

$$= \frac{1 - 0,56}{1 - 0,56} = \frac{0,44}{0,44}$$

$$= 1$$

#### j) Pengkoding II

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori relevansi berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Relevansi / Nilai Berita	Frekuensi	Proporsi
Tinggi	6	0,55
Menengah	4	0,36
Rendah	1	0,09

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,55^2 + 0,36^2 + 0,09^2$$

$$= 0,3025 + 0,1296 + 0,0081$$

$$= 0,4402$$

$$= \frac{0,91 - 0,44}{1 - 0,44} = \frac{0,47}{0,56}$$

$$= 0,83$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori akurasi Berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliability)nya adalah 0,83. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,81 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Relevansi / Nilai Berita	Frekuensi	Proporsi
Tinggi	3	0,5
Menengah	2	0,34
Rendah	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,5^2 + 0,34^2 + 0,16^2$$

$$= 0,25 + 0,1156 + 0,0256$$

$$= 0,3912$$

$$= \frac{0,83 - 0,39}{1 - 0,39} = \frac{0,44}{0,61}$$

$$= 0,72$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori relevansi berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,62 + 0,83}{2} = 0,725$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,725 atau 72,5%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,72}{2} = 0,6361$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,86 atau 86%.

### 13. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Netralitas Berita.

#### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisien Reliabilitasnya adalah 0,81. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,81 disebut observed agreement (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	3	0,27
Kesesuaian Judul Berita Dan Isi	6	0,55
Dramatisasi	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,27^2 + 0,55^2 + 0,18^2$$

$$= 0,072 + 0,303 + 0,032$$

$$= 0,407$$

$$= \frac{0,81 - 0,40}{1 - 0,40} = \frac{0,41}{0,60}$$

$$= 0,69$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	2	0,33
Kesesuaian Judul Berita Dan Isi	3	0,50
Dramatisasi	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,33^2 + 0,50^2 + 0,16^2$$

$$= 0,109 + 0,25 + 0,256$$

$$= 0,38$$

$$= \frac{1 - 0,38}{1 - 0,38} = \frac{0,62}{0,62}$$

$$= 1$$

### k) Pengkoding II

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	2	0,18
Kesesuaian Judul Berita Dan Isi	7	0,63
Dramatisasi	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,18^2 + 0,63^2 + 0,18^2$$

$$= 0,032 + 0,396 + 0,032$$

$$= 0,460$$

$$= \frac{0,91 - 0,46}{1 - 0,46} = \frac{0,45}{0,56}$$

$$= 0,80$$

#### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori netralita berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Netralitas Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
Pencampuran Opini	1	0,16
Kesesuaian Judul Berita Dan Isi	4	0,66
Dramatisasi	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,16^2 + 0,66^2 + 0,16^2$$

$$= 0,02 + 0,43 + 0,02$$

$$= 0,47$$

$$= \frac{0,83 - 0,47}{1 - 0,47} = \frac{0,36}{0,53} = 0,67$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori netralitas berita untuk kedua surat kabar yaitu:



$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,69 + 0,80}{2} = 0,745$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,745 atau 74,5%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,67}{2} = 0,835$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.835 atau 83,5%.

#### 14. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Balance Berita.

Balance	Kompas	Republika	Jumlah
<i>Cover Both Side</i>	7 (41,6%)	3 (17,64%)	10 (58,8%)
Berimbang	4 (23,52%)	3 (17,64%)	7 (41,16%)
Jumlah	11 (64,68%)	6 (35,28%)	17 (100%)

#### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori balance berita diperoleh persamaan (M) = 9 item berita

$$CR = \frac{2 \times 9}{11+11} = \frac{18}{22} = 0,81$$

Balance Berita	Frekuensi	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	7	0,63
Berimbang	4	0,37

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,63^2 + 0,37^2$$

$$= 0,39 + 0,13$$

$$= 0,52$$

$$= \frac{0,81 - 0,52}{1 - 0,52} = \frac{0,29}{0,48}$$

$$= 0,60$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori balance berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Balance Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	4	0,66
Berimbang	2	0,34

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,66^2 + 0,34^2$$

$$= 0,44 + 0,11$$

$$= 0,55$$

$$= \frac{0,83 - 0,55}{1 - 0,55} = \frac{0,28}{0,45}$$

$$= 0,63$$

### I) Pengkoding II

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori netralitas berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Balance Berita	<i>Frekuensi</i>	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	8	0,73
Berimbang	3	0,27

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,73^2 + 0,27^2$$

$$= 0,53 + 0,07$$

$$= 0,6$$

$$= \frac{0,91 - 0,60}{1 - 0,60} = \frac{0,31}{0,40}$$

$$= 0,77$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori netralita berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Balance Berita	Frekuensi	Proporsi
<i>Cover Both Side</i>	3	0,50
Berimbang	3	0,50

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,50^2 + 0,50^2$$

$$= 0,25 + 0,25$$

$$= 0,50$$

$$= \frac{0,83 - 0,50}{1 - 0,50} = \frac{0,33}{0,50}$$

$$= 0,66$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori netralitas berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,60 + 0,77}{2} = 0,685$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,685 atau 68,5%.

$$\text{Republika} = \frac{0,63 + 0,66}{2} = 0,645$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,645 atau 64,5%.

#### 15. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Sumber Berita.

##### Pengkoding I

##### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliabilitynya adalah 0,90. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement(persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,09
Eksternal Partai (EP)	2	0,18
Intelektual (I)	1	0,09
Sumber Lain (SL)	2	0,18
IP & EP	4	0,36
EP & I	1	0,09

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,09^2 + 0,18^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,36^2 + 0,09^2$$

$$= 0,0081 + 0,0324 + 0,0081 + 0,0324 + 0,1296 + 0,0081$$

$$= 0,218$$

$$= \frac{0,90 - 0,21}{1 - 0,21} = \frac{0,69}{0,79}$$

$$= 0,87$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,16
IP & EP	3	0,50
EP & I	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,16^2 + 0,50^2 + 0,16^2$$

$$= 0,256 + 0,25 + 0,256$$

$$= 0,76$$

$$= \frac{1 - 0,76}{1 - 0,76} = \frac{0,24}{0,24} = 1$$

### m) Pengkoding II

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,09
Eksternal Partai (EP)	2	0,18
Intelektual (I)	1	0,09
Sumber Lain (SL)	2	0,18
IP & EP	3	0,27
EP & I	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,09^2 + 0,18^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,27^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,0081 + 0,0324 + 0,0081 + 0,0324 + 0,0729 + 0,0324 \\
 &= 0,179 \\
 &= \frac{0,91 - 0,18}{1 - 0,18} = \frac{0,73}{0,82} \\
 &= 0,89
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Sumber Berita	Frekuensi	Proporsi
Intelektual Partai (IP)	1	0,16
IP & EP	4	0,66
EP & I	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,16^2 + 0,66^2 + 0,16^2$$

$$= 0,02 + 0,43 + 0,02$$

$$= 0,47$$

$$= \frac{0,83 - 0,47}{1 - 0,47} = \frac{0,36}{0,53}$$

$$= 0,67$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori sumber berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,87 + 0,89}{2} = 0,88$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,88 atau 88%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,67}{2} = 0,835$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,835 atau 83,5%.

## 16. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Ragam Berita

### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori ragam berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliabilitynya adalah 0,90. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	8	0,72
Berita Ringan	1	0,09
Kolom	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,72^2 + 0,09^2 + 0,18^2$$

$$= 0,518 + 0,0081 + 0,0324$$

$$= 0,57$$

$$= \frac{0,90 - 0,57}{1 - 0,57} = \frac{0,33}{0,43}$$

$$= 0,76$$

#### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori ragam berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	5	0,83
Berita Ringan	1	0,16

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,83^2 + 0,16^2$$

$$= 0,688 + 0,256$$

$$= 0,944$$

$$= \frac{1 - 0,94}{1 - 0,94} = \frac{0,06}{0,06}$$

$$= 1$$

#### n) Pengkoding II



## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori ragam berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	7	0,63
Berita Ringan	2	0,18
Kolom	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,63^2 + 0,18^2 + 0,18^2$$

$$= 0,3969 + 0,0324 + 0,0324$$

$$= 0,4617$$

$$= \frac{0,91 - 0,46}{1 - 0,46} = \frac{0,45}{0,54}$$

$$= 0,83$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori sumber berita diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Ragam Berita	Frekuensi	Proporsi
Berita Langsung	4	0,67
Berita Ringan	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,67^2 + 0,33^2$$

$$= 0,4489 + 0,1089$$

$$= 0,57$$

$$= \frac{0,83 - 0,57}{1 - 0,57} = \frac{0,26}{0,43}$$

$$= 0,61$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori sumber berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,76 + 0,83}{2} = 0,795$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,795 atau 79,5%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,61}{2} = 0,805$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,805 atau 80,5%.

## 17. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Materi Berita

### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisient Reliabilitynya adalah 0,90. Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	2	0,18
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	1	0,09
Lain-lain	4	0,36
Kombinasi...dan...;	4	0,36

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,18^2 + 0,09^2 + 0,36^2 + 0,36^2 \\
 &= 0,0324 + 0,0081 + 0,1296 + 0,1296 \\
 &= 0,2997 \\
 &= \frac{0,90 - 0,29}{1 - 0,29} = \frac{0,61}{0,71} \\
 &= 0,85
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkode I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 6}{6 + 6} = \frac{12}{12} = 1$$

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Manuver-manuver politik PDI Perjuangan	1	0,17
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	1	0,17
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	1	0,17
Lain-lain	2	0,33
Kombinasi...dan...;	1	0,17

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,17^2 + 0,17 + 0,17^2 + 0,33^2 + 0,17^2 \\
 &= 0,0289 + 0,0289 + 0,0289 + 0,1089 + 0,0289
 \end{aligned}$$

$$= 0,2245$$

$$= \frac{1 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,78}{0,78}$$

$$= 1$$

### o) Pengkoding II

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Manuver-manuver politik PDI Perjuangan	1	0,09
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	2	0,18
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	1	0,09
Lain-lain	3	0,27
Kombinasi...dan...;	4	0,36

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,09^2 + 0,18^2 + 0,09^2 + 0,27^2 + 0,36^2$$

$$= 0,0081 + 0,0324 + 0,0081 + 0,0729 + 0,1296$$

$$= 0,26$$

$$= \frac{0,91 - 0,26}{1 - 0,26} = \frac{0,65}{0,74}$$

$$= 0,87$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori materi berita diperoleh persamaan (M) = 6 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Materi Berita	Frekuensi	Proporsi
Manuver-manuver politik PDI Perjuangan	1	0,17
Pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden	1	0,17
Pengenalan program partai pada pemilu 2009	2	0,33
Lain-lain	1	0,17
Kombinasi...dan...;	1	0,17

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned} &= 0,17^2 + 0,17 + 0,33^2 + 0,17^2 + 0,17^2 \\ &= 0,0289 + 0,0289 + 0,1089 + 0,0289 + 0,0289 \\ &= 0,2245 \\ &= \frac{0,83 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,61}{0,78} \\ &= 0,78 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori materi berita untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,85 + 0,87}{2} = 0,86$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,86 atau 86%.

$$\text{Republika} = \frac{1 + 0,78}{2} = 0,89$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,89 atau 89%.

## 18. Hasil Uji Reliabilitas Untuk Kategori Berdasarkan Kecenderungan Fungsi Item Informasi.

### Pengkoding I

#### SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,90$$

Dari hasil di atas, maka CR (Coefisien Reliabilitasnya adalah 0,90 Demikian hasil yang diperoleh dari rumus di atas adalah 0,90 disebut observed agreement (persetujuan yang diperoleh dari penelitian). Selanjutnya untuk memperkuat uji reliabilitas di atas digunakan rumus Scott

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,09
Alat ukur pendapat umum	5	0,45
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum	1	0,09
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,09^2 + 0,45^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,18^2$$

$$= 0,0081 + 0,2025 + 0,0081 + 0,0324 + 0,0324$$

$$= 0,29$$

$$= \frac{0,90 - 0,29}{1 - 0,29} = \frac{0,61}{0,71}$$

$$= 0,85$$

## SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,17
Alat ukur pendapat umum	1	0,17
Alat ukur pendapat umum - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,17
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,17
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned} &= 0,17^2 + 0,17 + 0,17^2 + 0,17^2 + 0,33^2 \\ &= 0,0289 + 0,0289 + 0,0289 + 0,0289 + 0,1089 \\ &= 0,2245 \\ &= \frac{0,83 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,61}{0,78} \\ &= 0,78 \end{aligned}$$

### p) Pengkoding II

## SKH KOMPAS

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 11 item berita SKH Kompas yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 10 item berita

$$CR = \frac{2 \times 10}{11 + 11} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Berdasarkan rumus Scott diperoleh:

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,09
Alat ukur pendapat umum	4	0,36
Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,09
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum	1	0,09
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,18

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$\begin{aligned}
 &= 0,09^2 + 0,36^2 + 0,09^2 + 0,09^2 + 0,18^2 + 0,18^2 \\
 &= 0,0081 + 0,1296 + 0,0081 + 0,0081 + 0,0324 + 0,0324 \\
 &= 0,22 \\
 &= \frac{0,91 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,69}{0,78} \\
 &= 0,88
 \end{aligned}$$

### SKH REPUBLIKA

Hasil uji reliabilitas antara pengkoding I dengan peneliti bahwa dari 6 Item Berita SKH Republika yang diteliti untuk kategori Kecenderungan Fungsi Item Informasi diperoleh persamaan (M) = 5 item berita.

$$CR = \frac{2 \times 5}{6 + 6} = \frac{10}{12} = 0,83$$

Kecenderungan Fungsi Item Informasi	Frekuensi	Proporsi
Saluran informasi politik	1	0,17
Alat ukur pendapat umum	1	0,17
Alat ukur pendapat umum - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	1	0,17
Saluran informasi politik - Alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana	1	0,17



besar		
Saluran informasi politik – alat ukur pendapat umum - alat bagi yang mempunyai ambisi, masalah dan rencana besar	2	0,33

Maka persetujuan yang diharapkan:

$$= 0,17^2 + 0,17 + 0,17^2 + 0,17^2 + 0,33^2$$

$$= 0.0289 + 0.0289 + 0.0289 + 0.0289 + 0.1089$$

$$= 0,2245$$

$$= \frac{0,83 - 0,22}{1 - 0,22} = \frac{0,61}{0,78} = 0,78$$

Dari perhitungan di atas diketahui reliabilitas rata-rata kategori Kecenderungan

Fungsi Item Informasi untuk kedua surat kabar yaitu:

$$\text{SKH Kompas} = \frac{0,85 + 0,88}{2} = 0,86$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0,86 atau 86%.

$$\text{Republika} = \frac{0,78 + 0,78}{2} = 0,78$$

Jadi tingkat reliabilitas rata-rata yang diperoleh kedua pengkoding adalah 0.78 atau 78%.

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743  
 =====

KOMPAS, Kamis, 29-01-2009. Halaman: 22

Kewirausahaan  
 KEMANDIRIAN DAN KREATIVITAS ALA WONG SOLO

Triningsih (50) memasukkan paku payung sepanjang 9 cm ke lubang mutiara hitam imitasi. Dengan tang khusus, ia membengkokkan ujung paku membentuk lingkaran. Dengan demikian, mutiara itu kini bisa menjadi bandul kalung atau anting-anting.

Aksesori buatan Triningsih dan anggota PKK Ketelan lainnya, bersama produk lain, seperti gantungan kunci, tas perca batik, dan tas payet, dipajang di stan PKK Ketelan dalam One Day Solo Creative Industry (ODSCI). Acara ini digelar di City Walk Kota Solo pada ruas Gendengan hingga Purwosari, Rabu (28/1).

Stan lain, Abel's, milik Yulie Wijayasari, juga mengandalkan aksesori. Bedanya, Yulie lebih suka memakai batu alam, kayu, dan logam.

Tidak jauh dari Abel's, ada stan Cangkang Lamp Art and Craft. Stan ini menjajakan tempat tisu, lampu duduk, tempat lilin, gantungan kunci, dan pernak-pernik hiasan rumah tangga, yang dihias pecahan kulit telur membentuk mozaik berwarna alami, seperti coklat tua, putih tulang, dan hijau kebiruan.

Produk ini dibuat oleh Shavieq bersama istrinya, Titik, dan anaknya, Rosda Musa. Produk mereka dijual dengan harga Rp 3.000-Rp 750.000 per buah.

"Awalnya, kami membuat hiasan dari kayu bakar. Setelah lewat popularitasnya dan tidak diminati konsumen, ibu saya punya ide membuat kerajinan dari kulit telur," kata Rosda.

ODSCI menampilkan 63 stan. Sebanyak 70 persen di antaranya stan produk batik. Sisanya adalah kerajinan topeng kayu, keris, tenun, mainan dan pajangan kayu, serta tas dari bahan alam. Sambil melihat-lihat stan, pengunjung dihibur dengan sajian kelompok kesenian Topeng Ireng Yaksa Manunggal dari Boyolali.

Dari kegiatan ini, menurut Koordinator ODSCI Heru Prasetya dari Mataya Art & Heritage, berhasil memetakan bahwa kekuatan utama ekonomi kreatif Solo adalah batik, kerajinan, dan seni pertunjukan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo Saryanto Joko Pangarso saat membuka acara mengatakan, industri kreatif punya arti penting karena dapat mendongkrak perekonomian.

Hal itu dirasakan Triningsih. Dari hasil membuat aksesori ditambah membuat baki lamaran dan menjahit baju pesanan, perempuan yang hanya lulus SMP itu mampu menyekolahkan ketiga anaknya di perguruan tinggi. Sedangkan Yulie mampu membuka lapangan pekerjaan. Ia mempekerjakan tiga orang untuk mewujudkan desainnya menjadi aksesori.

Meski demikian, kegiatan yang membidik pasar warga Solo serta para peserta Rakernas PDI-P itu belum membuahkan hasil memuaskan. Di stan Cangkang, menurut Titik, barang yang laku hanya tiga gantungan kunci dan satu tempat lilin. Sedangkan aksesori Triningsih laku sekitar 230 buah atau sepertiga dari stok yang ia bawa. Bisa jadi hal itu merupakan imbas lesunya perekonomian. (eki)

Foto:1  
 Kompas/Heru Sri Kumoro

Berbagai jenis kerajinan dipajang dalam One Day Solo Creative Industry atau Pameran Industri Kreatif Solo di City Walk, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/1). Kegiatan yang diikuti 63 stan ini diharapkan bisa memacu industri kreatif di Solo untuk eksis dan berkembang di tengah terpaan krisis global.

①

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743  
 =====

KOMPAS, Kamis, 22-01-2009. Halaman: 1

Pilpres 2009  
 MEGAWATI DAN HB X BERTEMU EMPAT MATA

Jakarta, Kompas

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bertemu empat mata dengan kandidat presiden yang diusung Partai Republikan, Sultan Hamengku Buwono X, di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (21/1).

Muncul spekulasi bahwa pertemuan Mega-Sultan untuk memuluskan terwujudnya duet "Mega-Buwono" di Rapat Kerja Nasional PDI-P di Solo, 27-29 Januari. Namun, Ketua Fraksi PDI-P di DPR Tjahjo Kumolo mengatakan, tak ada yang mengetahui isi pembicaraan keduanya karena pertemuan berlangsung empat mata.

Saat Sultan tiba di Teuku Umar, pertemuan didahului dengan makan pagi bersama dengan menu bubur ayam. Megawati didampingi suaminya yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas, Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, dan Tjahjo Kumolo. Setelah itu, Megawati dan Sultan mengadakan pembicaraan berdua selama lebih dari satu jam di ruang belakang.

"Saya tidak tahu isi pembicaraan empat mata, tapi keduanya sepakat akan hadir memenuhi undangan," papar Tjahjo. "Sama-sama orang yang lahir di Yogyakarta, sama-sama orang Jawa, sama-sama tokoh reformasi, kalau sudah berkenan saling mengunjungi kan ada pertanda baik. Biarlah kedua beliau yang rembulan bicara dari hati ke hati untuk masa depan Indonesia," lanjutnya.

Ingin presiden

Pada hari yang sama, Megawati mengundang secara terpisah calon presiden yang didukung Partai Indonesia Sejahtera, Sutiyoso.

Walau sama-sama telah ditetapkan oleh PDI-P sebagai dua dari lima calon wakil presiden yang bakal dipasangkan dengan Megawati dalam pemilu mendatang, baik Sultan maupun Sutiyoso masih belum terang-terangan menyatakan bersedia atau menolak "pinangan" itu.

Seusai pertemuan tersebut, baik Sultan maupun Sutiyoso kepada wartawan menyatakan, sampai sekarang mereka masih berstatus tetap mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon RI-1 dalam bursa pemilihan presiden mendatang.

"Deklarasi saya kan sampai sekarang masih untuk maju sebagai capres. Lagi pula, tadi (dalam pertemuan) tidak bicara soal itu, kok. Saya cuma diundang hadir dalam Rakernas PDI-P. Kalau diundang, ya, saya akan datang. Tadi itu cuma mengobrol sambil sarapan pagi," ujar Sultan.

Sultan juga mengatakan mengundang Megawati untuk mampir ke Keraton Yogyakarta sehari sebelum Rakernas PDI-P.

Sikap hampir sama ditunjukkan Sutiyoso yang diterima Megawati setelah Sultan pulang. Pertemuan antara Megawati dan Sutiyoso berlangsung selama sekitar satu jam, yang dihadiri sejumlah petinggi PDI-P lainnya.

"Saya kemari karena akan diundang Bu Megawati untuk hadir di Rakernas PDI-P di Solo nanti. Selama ini kan antara saya dan Bu Megawati sudah ada hubungan emosional yang baik. Saya pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta saat beliau masih menjadi presiden. Ketika ketemu tadi, tidak ada tawaran untuk (dijadikan cawapres) itu. Sampai sekarang saya masih belum berpikir ke sana," ujar Sutiyoso.

Menurut Sutiyoso, dirinya tidak mau berandai-andai dan hanya akan menunggu kepastian peta politik seusai pemilu legislatif. "Sampai saat

MP & EP



ini saya masih menyatakan siap untuk bersaing dengan beliau (Megawati) di pemilihan presiden nanti. Tapi, nanti akan kita lihat juga perkembangannya, saya kira semua juga akan bersikap begitu," ujar Sutiyoso.

Pramono Anung menyatakan, memang banyak orang yang menginginkan untuk maju dan terpilih sebagai RI-1, tetapi syarat pencalonan saat ini sangat berat. "Dengan syarat-syarat yang berat seperti itu, saya yakin paling cuma dua calon, Ibu Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memenuhi syarat maju," ujarnya.

Selama ini, lanjut Pramono, PDI-P telah menetapkan lima nama calon kandidat yang berpotensi dipasangkan dengan Megawati. Mereka adalah Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, Hidayat Nur Wahid, Sutiyoso, dan Sultan Hamengku Buwono X. Mengenai siapa nanti yang akan dipilih, hal itu akan diputuskan dalam Rakernas PDI-P, 27-29 Januari.

Belum tentu dukung

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, kemarin, menegaskan, partainya belum tentu mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pasalnya, keduanya belum tentu akan berpasangan kembali.

Suryadharma menyatakan itu se usai bersama jajaran DPP PPP bertemu dengan Wapres Kalla di kediaman Wapres di Jakarta. PPP bermaksud mengundang Wapres Kalla hadir pada acara ulang tahun ke-36 PPP di Jakarta Expo Kemayoran.

"Kami masih menunggu setelah pemilu legislatif karena baru dapat diketahui jumlah dukungan suara setiap parpol," ujarnya sambil menegaskan, jika ada pihak yang mengatakan partainya akan mendukung pasangan Yudhoyono-Kalla, itu di luar keputusan partai.

Suryadharma mengkritik sejumlah capres yang menyatakan niat untuk "maju", tetapi tidak mempertimbangkan secara nyata kepastiannya untuk bisa maju. Para capres itu dinilai hanya mengejar popularitas.

"Banyak capres yang sekarang ini tampil, tetapi tidak disertai hitung-hitungan nyata apakah dirinya benar-benar bisa 'bertanding' atau tidak," katanya.

Alasan itulah yang dipertimbangkan PPP. "Daripada muncul, tetapi tidak bisa bertanding, itu kan enggak bagus, lebih baik tidak usah muncul," lanjutnya.

Ditanya siapa capres yang dinilai sekadar mencari popularitas, Suryadharma Ali tak menjawab.

"Biar masyarakat sendiri yang menilai sosok capres sekarang ini seperti apa," katanya.

(DWA/SUT/HAR)

②

PUSAT INFORMASI KOMPAS  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743  
 =====

KOMPAS, Selasa, 27-01-2009. Halaman: 4

TEMU ELITE POLITIK BAK  
 Tuduhan "Pengeroyokan" Tidak

Jakarta, Kompas

Pertemuan antarelite politik menjelang Pemilihan Umum 2009 tidak lebih sekadar "sinetron politik". Sekalipun pertemuan tersebut wajar saja digagas dalam upaya mewujudkan koalisi, janganlah rakyat hanya disuguhi tontonan politik yang bahkan belum saatnya dimunculkan.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan Roy BB Janis di Jakarta, Sabtu (24/1). Menurut Roy, siapa pun, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, boleh saja bertemu dengan siapa pun yang dipandang berpotensi untuk mendukung pencalonan mereka dalam Pemilu 2009.

Namun, lanjutnya, pertemuan para elite politik yang terjadi belakangan ini tidak lebih seperti tontonan karena saat ini masih terlalu prematur untuk membahas soal koalisi untuk pencalonan presiden.

Menurut Roy, waktu yang tepat untuk secara intensif membahas soal koalisi adalah setelah pelaksanaan pemilu legislatif. "(Kalau sekarang), apalagi parpol baru, apa modalnya?" kata Roy.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang juga pengurus pusat Partai Demokrat menyebutkan, koalisi parpol menuju pencalonan presiden sebaiknya tidak main "keroyok". Bahkan, Andi mengilustrasikan Kurawa sebagai kelompok yang main keroyok, sementara Pandawa yang bermain kesatria.

Andi merespons pertemuan para tokoh politik, seperti Sultan Hamengku Buwono X, Sutiyoso, dan Prabowo Subianto, di kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Kamis (22/1).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat, siapa pun boleh saling menjajaki. Komunikasi politik antarpimpinan parpol wajar saja dilakukan sebelum ataupun sesudah pemilu legislatif. Yang penting, semua itu harus didasari niatan mendorong terbentuknya koalisi permanen demi terbentuknya pemerintahan yang stabil dan efektif. EPR 1.

Tidak tepat

Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, Sabtu, sampai saat ini bentuk koalisi politik yang tengah dan terus dijajaki banyak pihak menjelang Pemilu 2009 masih sangat cair dan masih memungkinkan munculnya banyak kejutan.

Oleh karena itu, lontaran tuduhan bahwa telah terjadi "pengeroyokan" secara politik terhadap peluang Yudhoyono dan Jusuf Kalla adalah tidak tepat.

"Jadi, enggak tepat juga kalau ada pernyataan Yudhoyono-Kalla sekarang sedang dikeroyok Megawati, seolah ada upaya menjatuhkan satu sama lain. Semua itu kan cuma soal bagaimana masing-masing pihak bisa mendapat pasangan yang pas untuk maju nanti," ujar Ikrar.

Calon presiden usungan PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam beberapa hari mendatang akan mendapat kepastian soal siapa dari lima orang kandidat pilihan partainya yang akan mendampingi dia sebagai calon wakil presiden untuk Pemilu 2009.

Keputusan itu akan diambil dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P, 27-28 Januari 2009, yang juga dihadiri kelima kandidat yang disebut-sebut akan hadir memenuhi undangan. Sebelumnya, penajakan dan pertemuan telah digelar dalam sejumlah kesempatan berbeda.

Para calon wakil presiden dari PDI-P itu, antara lain, adalah

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743

=====

KOMPAS, Selasa, 27-01-2009. Halaman: 15

MEGAWATI DIJAMU SULTAN HB X DI KERATON  
 Taufik Kiemas Ingin Pasangan Mega-HB X

Yogyakarta, Kompas

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Senin (26/1), dalam jamuan makan malam di Bangsal Sri Manganti Keraton Yogyakarta. Sultan menyatakan, ia dan Megawati ingin mengikuti apa yang pernah disumbangkan orangtua mereka untuk bangsa.

Dalam pertemuan itu, Sultan didampingi Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Megawati disertai suaminya, yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Taufik Kiemas.

Selain pengurus PDI-P, hadir pula Tim Sukses Sultan HB X, Franky Sahilatua dan Ketua Presidium Partai Republika Nusantara (Republikan) Moeslim Abdurrahman. Sultan memberikan kado ulang tahun kepada Megawati berupa foto Bung Karno bersama Sultan HB IX.

Sultan menuturkan, pertemuan itu adalah silaturahmi biasa, jangan hanya dimaknai peristiwapolitik. "Ini juga bisa menjadi peristiwa budaya, juga peristiwa kemanusiaan," katanya.

Menurut Sultan, wajar sebagai sesama manusia melakukan silaturahmi. Apalagi orangtua masing-masing, yaitu Sultan HB IX dan Soekarno, sama-sama pernah berkontribusi bagi bangsa Indonesia.

"Tidak ada jeleknya saya maupun Ibu (Megawati) juga punya kewajiban memberikan kontribusi bagi kebesaran bangsa dan negara. Adalah wajar anak-anaknya tetap mengikuti apa yang pernah disumbangkan orangtua dan menjaga nama baik," ucap Sultan lagi.

Sebelum makan malam, Sultan dan Megawati, didampingi istri dan suami, sempat bertemu selama 15 menit di Gedhong Jene Keraton. Seusai makan malam, Sultan menyatakan, dalam pertemuan itu tak dibicarakan sedikit pun masalah politik.

Saat ditanya kemungkinan ia menjadi calon wakil presiden bagi Megawati, Sultan menyatakan, deklarasinya adalah sebagai calon presiden.

Mega-HB X

Namun, Taufik Kiemas saat diminta komentar mengisyaratkan, duet Mega-Sultan dipastikan terwujud. "Itu pasti jadi," ucapnya lagi.

Senin siang, sebelum ke Keraton, Taufik juga terang-terangan menginginkan terwujudnya duet Mega-Sultan. Ia, dalam pidato tanpa teks pada Konsolidasi dan Pembekalan Struktural PDI-P di Yogyakarta, mengaku, berbahagia bisa mempersatukan dua orang yang berarti baginya, yaitu istrinya (Megawati) dan sahabatnya, Sultan HB X. "Saya rasa hal itu bukan kehendak saya, tetapi memang kehendak Yang di Atas sana," ujarnya.

Taufik juga menceritakan kedekatan Sultan HB X dan Megawati. Ia menyatakan, siang itu Sultan bersedia menghadiri acara PDI-P untuk menyapa simpatisan PDI-P. Sebaliknya, pada waktu bersamaan secara terpisah, Megawati menemui rakyat Sultan di Imogiri, Bantul.

Ketika Taufik berpidato meminta kader PDI-P di Yogyakarta bersiap menghadapi Pemilu 2009, beberapa pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Kulon Progo, DIY, membentangkan spanduk bertuliskan mendukung Sultan HB X menjadi calon wapres mendampingi Megawati pada Pemilu 2009.

Megawati ke Yogyakarta juga terkait Rapat Kerja Nasional IV PDI-P di Klaten, Jawa Tengah, mulai Selasa ini. Rakernas itu juga akan



memastikan pendamping Megawati dalam pencalonan presiden. Tujuh tokoh nasional, termasuk Sultan HB X, dipastikan menghadiri rakernas itu. (rwn/son/zal/sut)

Foto: 1  
kompas/wawan h prabowo

Ketua Umum PDI-PMegawati Soekarnoputri berbincang dengan Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dalam jamuan makan malam di Keraton Yogyakarta, Senin (26/1) malam. Sultan meminta kepada sejumlah media untuk tidak hanya memandang pertemuan tersebut sebagai peristiwa politik, tetapi juga wahana silaturahmi.

②

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743  
 =====

KOMPAS, Rabu, 28-01-2009. Halaman: 1

Rakernas PDI-P  
 DUKUNGAN KEPADA SULTAN MAKIN MENGUAT

Solo, Kompas

Mayoritas Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.

Sampai Selasa (27/1) malam, menurut sumber-sumber yang ditemui Kompas di Rapat Kerja Nasional PDI-P di Solo, sejumlah DPD mengonfirmasikan dukungan mereka kepada Sultan. Di antaranya adalah DPD Bali, Jawa Tengah, dan Banten. Sejumlah DPD di Indonesia bagian timur juga mengisyaratkan dukungan itu.

Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung ketika dikonfirmasi soal ini membenarkan adanya dukungan kepada Sultan. "Memang dari pandangan informal. Untuk Indonesia bagian timur mayoritas itu mengusulkan Sultan," paparnya, Selasa.

Akan tetapi, ada juga sejumlah daerah yang mencalonkan Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, Sutiyoso, dan Wiranto. DPD DKI Jakarta, misalnya, kemungkinan akan mengusulkan mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Dalam rakernas tersebut, selain Sultan, hadir pula Syafii Ma'arif, Akbar Tandjung, Sutiyoso, dan Ryamizard Ryacudu. Adapun Prabowo, Hidayat Nur Wahid, dan Wiranto tidak hadir.

Belum jawab

Walau sejumlah nama calon wapres telah mencuat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, secara pribadi dirinya belum bisa menjawab siapa yang akan mendampinginya sebagai calon wapres.

Namun, Megawati dalam keterangan pers mengatakan, nama bisa saja muncul dalam rakernas. "Tetapi, apakah akan diputuskan atau belum, bergantung dari proses rakernas ini," paparnya.

Setidaknya dalam rakernas tersebut dilakukan pembahasan mengenai calon wapres dari PDI-P dan hasilnya akan disampaikan pada penutupan rakernas. "Jadi, kalau sekarang ditanya bertubi-tubi siapa yang jadi calon wapres saya, kan semua juga tahu, yang datang ke sini tidak ada satu pun loh yang mempunyai keinginan jadi calon wapres," ujarnya.

Menurut Megawati, semua tokoh partai yang datang menghadiri pembukaan rakernas menyatakan dirinya adalah capres. "Dan, mereka datang sebagai tamu terhormat di PDI-P ini, dan memang kami undang," lanjutnya.

Ditanya soal kesiapannya menjadi calon wapres mendampingi Megawati, Sultan belum memberi kepastian. Hal senada disampaikan Sutiyoso. Ia pun belum memberi kepastian.

Sikap Sultan dan Sutiyoso itu berbeda dengan sikap Akbar. Ia memberi isyarat siap mendampingi Megawati dalam Pemilu Presiden 2009. "Kalau saya nyatakan secara resmi, belum saat ini. Tapi, sebagai pejuang dan bergerak di bidang organisasi, partai politik, dan dalam pemerintahan sekian lama, saya siap mengabdikan pada bangsa dan negara bila ada kesempatan," kata Akbar.

Pada Pemilu 2004 Akbar bersama Megawati membangun Koalisi Kebangsaan. (SUT/SON)

*IP > EP*



④

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743  
 =====

KOMPAS, Rabu, 28-01-2009. Halaman: 4

MEGA KRITIK SBY LAGI

Partai Demokrat: SBY "Do Something", Megawati "Do Nothing"

Solo, Kompas

Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Selasa (27/1), kembali mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menilai Yudhoyono gagal memenuhi janjinya dalam pemilihan umum lalu.

Terkait kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), bahkan Megawati menilai pemerintah telah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak, yoyo.

Megawati menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IV PDI-P di Hotel The Sunan, Solo, Selasa. Hadir pula sejumlah tokoh nasional, seperti mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah A Syafii Maarif, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Menurut Megawati, penurunan harga BBM yang dilakukan pemerintah bersifat setengah hati dan lebih mengesankan hanya untuk mendapat simpati publik, tidak untuk menyelesaikan persoalan utama, yaitu meningkatkan daya beli dan menyejahterakan rakyat.

"Pemerintah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak, yoyo. Terlempar ke sana kemari, kelihatannya indah, tetapi pada dasarnya membuat rakyat tak menentu hidupnya. Hal ini menunjukkan ketakrelaan pemerintah untuk berkorban lebih banyak lagi bagi kepentingan rakyat banyak," ujar Megawati, yang langsung disambut tepuk tangan.

Tidak berbuat

Menanggapi kritik pedas itu, Partai Demokrat sebagai pendukung Yudhoyono balik menyerang. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru menilai Megawati yang tidak berbuat apa.

"Pernyataan itu kian memperjelas beda antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah menjalankan politik do something, sedangkan Ibu Mega melaksanakan politik do nothing. Partai oposisi hanya produktif dalam melahirkan perumpamaan, seperti poco-poco dan yoyo," katanya.

Menurut Anas, pernyataan itu juga menjadi tanda yang nyata bahwa Megawati panik dengan kebijakan pemerintah yang populis. Sebagai pemimpin partai politik yang mengaku pro wong cilik semestinya berani mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat. Jangan karena popularitas pemerintah naik lantaran harga BBM turun, lantas memproduksi penilaian yang tidak tepat.

"Kami yakin, rakyat lebih suka pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah nyata ketimbang oposisi yang berpikir keras memproduksi kalimat ibarat. Kritik oposisi yang tidak obyektif, semenarik apa pun pengibaratanya, tak akan mampu memisahkan perasaan rakyat kepada pemerintah yang bekerja," ujar Anas lebih lanjut.

Tawarkan kebijakan

Megawati menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Yudhoyono kian menjauh dari cita-cita mulia keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi rakyat. Itu dibuktikan dengan kian tak terjangkau harga sembilan bahan pokok (sembako). Hal ini ditunjukkan dari rata-rata inflasi bahan makanan yang pada tahun 2004 hanya 4,8 persen, sedangkan rata-rata tahun 2005-2007 adalah 12,7 persen.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia juga terjadi liberalisasi yang berlebihan. Kalau pada periode 2002-2004 penguasaan pasar domestik oleh produsen lokal sebesar 74 persen, pada periode 2005-2007 turun menjadi 22 persen.

Untuk menandingi kebijakan pemerintah Yudhoyono itu, Megawati menawarkan Kebijakan Menata Kemakmuran Masa Depan yang disebutnya dengan Kebijakan 28. Ia yakin banyak elemen bangsa yang berpikiran sama dengan apa yang dipikirkannya. Karena itu, dia pun berharap untuk bersama-sama menuntaskan reformasi.

"Marilah kita tuntaskan reformasi ini bersama-sama. Mari kita rapatkan barisan kembali. Saya berharap kita bisa bekerja bersama, berjuang bersama untuk meraih cita-cita founding fathers, cita-cita proklamasi mencapai jembatan emas kemerdekaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh," katanya.

Menurut anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Dradjad Wibowo, yang juga hadir di Rakernas IV PDI-P mewakili Amien Rais, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufiq Kiemas dan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung W telah bertemu Amien Rais. Dalam pertemuan itu dibicarakan juga rencana pertemuan tokoh Ciganjur, yaitu Megawati, Sultan HB X, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais. (sut/son)

Foto: 1  
Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri membacakan pidato politik pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Hotel The Sunan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/1). Sejumlah tokoh hadir pada acara ini, antara lain adalah Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah A Syafii Maarif.

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743

=====

KOMPAS, Kamis, 29-01-2009. Halaman: 1

Rakernas IV  
 PDI-P TETAPKAN LIMA KRITERIA CALON WAPRES

Solo, Kompas

Rapat Kerja Nasional IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menetapkan secara definitif seorang calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri maju dalam Pemilu Presiden 2009. Rakernas hanya menetapkan lima kriteria calon wapres dan memberi mandat kepada Megawati dengan dibantu tim untuk mengerucutkan nama yang diusulkan pengurus daerah menjadi tiga sampai lima nama, dan ditetapkan satu nama dalam rakernas berikutnya.

Megawati berharap, dengan ditetapkannya kriteria calon wapres, akan semakin membuka peluang lebih banyak calon dan masyarakat pun dapat lebih banyak memberi masukan. Pada akhirnya terpilih calon wapres yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kriteria calon wapres yang ditetapkan dalam rakernas adalah setia kepada Pancasila dan UUD 1945, menjaga kemajemukan Indonesia, dan tak pernah diragukan komitmennya dalam melaksanakan Pancasila dan UUD1945. Selain itu juga mendapatkan dukungan rakyat, memiliki kepemimpinan yang merakyat, berkemampuan manajemen pemerintahan yang andal, tak terkena kasus korupsi, dan bisa bekerja sama dengan presiden terpilih sesuai dengan amanat UUD 1945.

"Kita jangan overestimate orang itu saja yang akan muncul. Kriteria itu akan membuka masyarakat untuk juga berpikir siapa orang yang sesuai," ujar Megawati kepada wartawan se usai acara penutupan Rakernas IV PDI-P di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/1) malam.

Tim ini terdiri dari internal partai dan masyarakat. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas, salah satu unsur masyarakat yang akan diusulkan adalah tokoh terbaik bangsa. "Buya Ahmad Syafii Ma'arif (mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah) bisa, Faizal Basri bisa, Jakob Oetama juga bisa," ucapnya.

Tim ini akan bekerja minggu depan. Tugas tim yang utama, selain melihat kriteria, adalah melakukan komunikasi politik dengan nama yang diusulkan daerah. "Contohnya Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR), bila ia dicalonkan tapi ternyata tidak mau, partai kan bisa malu," paparnya.

Usulan daerah

Nama yang diusulkan pengurus daerah PDI-P dari 33 provinsi sekitar 15 nama. Mereka, antara lain, Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, Surya Paloh, Akbar Tandjung, M Jusuf Kalla, Sutiyoso, Sutanto, Djoko Santoso, Wiranto, Ryamizard Ryacudu, Antasari Azhar, A Teras Narang, Fadel Muhammad, dan Sandiaga Uno.

Namun, dari sejumlah nama itu, yang termasuk lima besar secara berurutan adalah Sultan HB X, Prabowo, Hidayat, Surya Paloh, dan Akbar Tandjung. "Sultan HB X didukung semua provinsi," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung se usai menerima masukan dari daerah.

Pengurus daerah PDI-P di Jawa, yang merupakan daerah padat penduduk dan padat pemilih di atas 100 juta, usulannya juga bervariasi. Nama yang muncul, selain yang selama ini muncul di media, adalah mantan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Surya Paloh.

"Rakernas tidak menetapkan nomine dan menyebut nama. Masukan daerah akan digodok oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan tim untuk dikomunikasikan," kata Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDI-P.

Wilayah Sumatera yang terdiri dari 10 dewan pimpinan daerah (DPD) antara lain mengusulkan Sultan HB X (8 usulan DPD), Hidayat (5), Surya



Paloh (4), Akbar (3), Prabowo (3), Antasari (2), dan Ryamizard (1).

Menurut Sonny Keraf, Ketua DPP PDI-P lainnya, DPD di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat mengusulkan Sultan HB X, Akbar, Prabowo, Sutiyoso, Surya Paloh, dan Wiranto.

Usulan DPD PDI-P di Kalimantan adalah Sultan HB X, Hidayat, Surya Paloh, Akbar, Teras Narang, dan Prabowo. "Nama itu beredar bervariasi, tetapi nama Sultan HB X paling banyak disebut," kata Arief Budimanta, fungsionaris PDI-P.

#### Mesin politik

Menurut Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait, dalam diskusi di wilayah-wilayah juga berkembang pemikiran, untuk memenangkan Megawati, perlu juga diperhatikan figur, mesin politik, dan logistik. Figur dilihat dari survei, mesin partai dari hasil pemilu legislatif, dan logistik dianggap perlu juga karena riil akan berhadapan dengan pemerintahan berkuasa.

Setelah terpilih, calon wapres terpilih nantinya juga harus dipastikan bisa membantu presiden dan punya kesamaan dalam visi. (sut/son/eki)

(B)

PUSAT INFORMASI KOMPAS  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS, Kamis, 29-01-2009. Halaman: 4

GOLKAR MULAI JENGAH  
Muncul Upaya Siapkan Capres Alternatif

Jakarta, Kompas

Panggung persaingan menuju Pemilihan Umum 2009 saat ini seolah-olah hanya milik Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri. Partai Golkar sebagai partai politik besar pun merasa jengah sekadar diposisikan sebagai penonton.

Oleh karena itu, di lingkup internal Partai Golkar mulai diwacanakan untuk menggelus calon alternatif yang bakal diajukan dalam pemilu presiden mendatang.

Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu (28/1), menyebutkan, arus besar di internal Partai Golkar memang masih ingin memberikan kepercayaan lagi kepada duet Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla. Namun, di tengah persaingan yang berputar-putar sekitar Yudhoyono dan Megawati, mulai muncul upaya untuk menghadirkan calon alternatif. Jika kemungkinan ini disambut, Partai Golkar bisa saja memimpin koalisi alternatif tersebut. Namun, Priyo juga mengakui, perlu kehati-hatian atas langkah tersebut karena faktor ketidakenakan yang masih tinggi terhadap Yudhoyono.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq menilai panggung yang hanya dikuasai Yudhoyono dan Megawati lambat laun bakal menjadi tontonan yang semakin tidak menarik dan bisa melahirkan antipati. Kondisi itu bisa menstimulasi munculnya calon alternatif. Mahfudz memprediksi, "poros alternatif" memiliki peluang luar biasa.

Di tengah mengerucutnya persaingan Yudhoyono-Megawati, sebenarnya Partai Golkar punya modal politik untuk memunculkan pasangan calon ketiga. Namun, kesantunan Partai Golkar akibat posisi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden bisa berubah menjadi bumerang. Ia menilai sikap Golkar akan sangat menentukan konstelasi politik menjelang Pemilu Presiden 2009.

Langkah Sultan

Mengenai manuver politik mendekatkan Sultan dengan Megawati, Priyo menilai Sultan mestinya sedikit bersabar dan tidak tergoda dengan langkah partai politik lain. Sultan masih dipandang sebagai tokoh papan atas di Partai Golkar. Namun, Priyo mengakui, pernyataan Muladi bahwa Sultan melanggar disiplin partai memang merupakan ekspresi psikologi internal Partai Golkar.

Semakin hari, lanjutnya, kontribusi Sultan terhadap Partai Golkar menipis. Langkah Sultan juga dianggap berbeda dengan Kalla saat "meninggalkan" Partai Golkar yang mengajukan Wiranto pada Pemilu 2004. Saat itu Kalla secara resmi bersurat dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyebutkan, langkah Sultan untuk hadir dalam Rakernas PDI-P boleh-boleh saja. Kehadiran Sultan belum sampai melanggar disiplin Partai Golkar.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa ia tidak berminat terjun dalam politik praktis karena akan berkonsentrasi penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI. Beberapa tantangan yang harus dituntaskan adalah agenda reformasi internal di tubuh TNI serta upaya menghapus status disclaimer yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penggunaan anggaran TNI. "Namun, saya secara pribadi menyatakan terima kasih atas apresiasinya," kata Djoko Santoso. (DIK/DWA)

Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subianto, Sutiyoso, Akbar Tandjung,  
dan Hidayat Nur Wahid.

**Banyak pertimbangan**

Ikrar berpendapat, Megawati dan PDI-P diyakini bakal menghadapi banyak pertimbangan sebelum menentukan pilihan.

"Ada banyak pertimbangan harus dilakukan, seperti apakah seseorang punya rekam jejak baik, didukung anggaran yang cukup, didukung oleh elite maupun akar rumput, atau juga pertimbangan soal bagaimana kelak posisi pemerintah terhadap legislatif jika terpilih dan memerintah," ujar Ikrar. Semua pertimbangan ada konsekuensinya. (DIK/DWA)

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743  
 =====

KOMPAS, Jumat, 30-01-2009. Halaman: 3

Dari Rakernas PDI-P  
 MEGAWATI TERUS MENCARI PENDAMPING SEJATI  
 Oleh Sutta Dharmasaputra

Wakil Presiden bukan the real president. Namun, dia juga bukan "ban serep". Peran dan kedudukannya sangat digdaya. Jika tak sejalan, bisa-bisa "mengudeta".

Tidak heran, Megawati Soekarnoputri yang oleh partainya sudah ditetapkan sebagai calon presiden sejak akhir 2007, sampai sekarang belum menetapkan partnernya. Dalam Rapat Kerja Nasional IV yang ditutup Rabu (28/1) malam, satu nama pun belum juga ditetapkan.

Nama-nama yang diusulkan Dewan Pimpinan Daerah malah semakin beragam. Ada sekitar 15 nama. Mereka adalah Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sutiyoso, Wiranto, Ryamizard Ryacudu, Djoko Santoso, Sutanto, Teras Narang, Fadel Muhammad, Antasari Azhar, dan Sandiaga Uno.

Rakernas hanya menetapkan kriteria dan memberi mandat kepada Megawati untuk mengerucutkannya menjadi tiga sampai lima nama dengan dibantu tim kecil yang beranggotakan gabungan orang dalam dan luar partai. Baru dalam rakernas atau rapat koordinasi nasional berikutnya akan ditetapkan satu nama. Namun, waktunya pun belum ditetapkan.

Nasib Mega-HB X

Dari sekian nama yang berkembang itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ataupun Megawati tampaknya memberi perhatian paling besar kepada Sultan Hamengku Buwono X. Sudah tiga kali Megawati mengundang Sultan, yaitu duduk satu meja di peluncuran buku Megawati, melakukan pembicaraan empat mata di Teuku Umar, dan mengundang ke Rakernas IV. Sebelum ke Solo, Megawati datang ke Keraton Yogyakarta.

Dalam acara pembukaan rakernas itu, Sultan ditempatkan pada kursi dekat Megawati.

Semua DPD PDI-P di 33 provinsi mengusulkan Sultan, setelah itu baru disusun Prabowo 28, Hidayat 15, Surya Paloh 14, dan Akbar 13. Hampir semua DPD menilai Sultan memiliki visi yang sama dengan Megawati.

Berdasarkan survei, duet Mega-HB X memiliki elektabilitas paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dari lima calon yang diunggulkan, Mega-HB X juga diprediksi paling kecil menimbulkan resistensi. Dengan demikian, bisa menandingi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Persoalannya adalah apakah Sultan bersedia menjadi wakil presiden? Dalam deklarasinya, Sultan menegaskan, dirinya siap menjadi presiden, bukan wakil presiden. Sebagai seorang raja, dia pun tidak mungkin menarik ucapannya itu karena prinsip Sabda Pandita Ratu. Karena itu, dalam berbagai kesempatan, ketika ditanya pers soal kesiapan menjadi wakil presiden, Sultan tidak pernah sekali pun menyatakan siap. Namun, sebagai Raja Jawa, Sultan juga tidak pernah mengatakan menolak. Dia hanya mengatakan, "Deklarasi saya kan sebagai calon presiden."

Hal itu diperkuat Franky Sahilatua, salah satu anggota Tim Pelangi Perubahan (rekan perjuangan Sultan). Menurutnya, Sultan sama sekali belum memikirkan posisi wakil presiden. Apabila sampai pada akhirnya Sultan tidak mendapatkan kendaraan partai yang cukup untuk maju sebagai calon presiden, Sultan tidak akan maju sebagai cawapres.

"Ide Sultan itu mengukung perubahan, bukan mencari kursi," tegasnya.



Sultan lebih populer

Rekan seperjuangan Sultan yakin, popularitas Sultan saat ini sudah lebih unggul daripada Megawati. Namun, bila keduanya maju sebagai capres juga malah mengkhawatirkan. "Keduanya harus bersinergi dan salah satu harus legawa," papar Franky Sahilatua.

Apakah yang diucapkan Franky ini seperti yang dirasakan Sultan? Sejumlah petinggi PDI-P yang mendukung duet Mega-HB X justru berkeyakinan sebaliknya. Mereka yakin bahwa suatu saat Sultan akan bersedia menjadi cawapres. Seorang petinggi partai merasa bahwa tanda kesediaan itu telah ditunjukkan Sultan secara implisit.

"Tiga kali datang itu Sultan selalu berdiri di sebelah kiri Ibu. Waktu pembukaan juga pakai batik Parang, simbol bersedia jadi bumper." ujarnya.

Ada juga yang menafsirkan bahwa ini hanya persoalan waktu. Setelah sejumlah tokoh yang meninggalkan Yudhoyono dirangkul, termasuk tokoh reformasi Ciganjur, Mega-HB X pun akan segera dipastikan. Informasi yang diperoleh, dalam waktu dekat pun akan diadakan pertemuan Ciganjur plus.

Ada juga elite PDI-P yang belum merasa yakin bahwa Mega-HB X juga bisa memenangi pertarungan karena Sultan tidak memiliki mesin politik yang besar dan juga logistik. Padahal, Mega-HB X akan berhadapan dengan Yudhoyono yang saat ini berkuasa. Yang diperlukan juga adalah kombinasi Jawa dan luar Jawa.

Ada juga yang berpandangan bahwa Mega-HB X harus segera dipastikan. Apabila terlambat, Sultan bisa digandeng kendaraan lain dan itu bisa membubarkan strategi kemenangan. Belum lagi kalau Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan luas kepada partai politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden. EP

Mencermati kondisi ini, perluasan calon bisa ditafsirkan beragam. Bisa sebagai upaya mengulur waktu sekaligus taktik memecah lawan politik atau memang upaya penjarangan untuk mengantisipasi jika Sultan tidak bersedia.

Yang pasti Megawati tidak mau gegabah menentukan ini. Saat menutup Rakernas IV, Megawati mengatakan, "Saya bisa lebih hati-hati dan matang."



P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
 Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
 Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
 Fax. 5347743  
 =====

KOMPAS Jawa Tengah, Jumat, 30-01-2009. Halaman: 2

Akademia  
 PAHIT MANISNYA "PERKAWINAN" POLITIK  
 Oleh Cita Adati Eka Rusmana

Calon presiden dari PDI-P, Megawati Soekarnoputri, masih terus menajaki figur calon wakil presiden yang akan mendampingi dirinya untuk maju dalam Pemilu Presiden 2009. Salah satunya, kandidat presiden yang diusung Partai Republikan, Sultan Hamengku Buwono X (Kompas, 20/1/2009). Mampukah Megawati "meminang" Sultan sebagai cawapresnya?

UU Pemilihan Presiden (Pilpres) 2008 yang telah disahkan, secara tak langsung menyeleksi secara ketat kandidat presiden yang ingin berpartisipasi dalam Pilpres 2009. Salah satu isinya berupa pemberlakuan ambang batas syarat kursi atau suara (election threshold) bagi pengajuan calon presiden, dengan minimal memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Aturan hukum itu menyebabkan tidak semua orang yang "mendeklarasikan" dirinya sebagai calon presiden mampu menjadi, minimal, kandidat presiden resmi yang fotonya bakal tercantum pada surat suara pilpres putaran pertama.

Ketatnya seleksi itu menimbulkan perubahan sikap pada beberapa bakal calon presiden "baru" kita. Ada yang melakukan hitung-hitungan sejak awal, lalu mundur setelah hasilnya memperlihatkan tidak adanya peluang untuk terus maju. Ada yang nekat tetap berkampanye dengan berbagai cara, meski peluangnya kecil sekali untuk mendapatkan dukungan tambahan yang signifikan.

Beda halnya dengan calon presiden "lama" yang sudah mengantongi popularitas dan pemilih setia selama periode kepemimpinannya. Megawati, misalnya, pada temuan Lembaga Survei Indonesia, 10-22 Desember 2008, memperlihatkan bahwa dia mendapat suara 18 persen bila pilpres dilakukan saat itu. Ranking perolehan suara Megawati itu di urutan kedua, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat 43 persen suara. Prabowo Subianto dan Sultan HB X mendapat masing-masing lima persen, persis di bawah ranking Megawati.

Melejitnya popularitas dan elektabilitas SBY yang diperlihatkan LSI-dan bahkan oleh beberapa lembaga survei lainnya-menuntut Megawati menyusun strategi yang dapat "menambah" dukungan suara terhadapnya. Di antaranya dengan melakukan pendekatan terhadap beberapa tokoh politik yang potensial, seperti Sultan HB X, agar bersedia mendampingi Megawati kelak sebagai cawapres. Meski begitu, tetap harus diperhatikan juga tingkat kecocokan di antara keduanya.

Terdapat beberapa keuntungan yang akan didapat Mega bila ia berhasil "meminang" Sultan. Pertama, sudah munculnya dukungan kuat dari Indonesia bagian timur terhadap pasangan capres-cawapres Megawati-Sultan. Hal ini diakui Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung saat Rapat Kerja Nasional PDI-P di Solo. Begitu pula dengan DPD Bali, Jawa Tengah, dan Banten juga mengonfirmasikan dukungan mereka kepada Sultan (Kompas, 28/1/2009). Yang paling penting lagi, Sultan juga sudah mendapat "restu" dari rakyat setianya di Yogyakarta ketika Pisowanan Ageng.

Kedua, selain mendapat dukungan penuh dari Partai Republikan, Sultan juga masih memiliki pendukung loyal dari Partai Golkar. Terlebih kalau masih tidak adanya tokoh dominan pada partai beringin ini untuk menjadi tokoh nomor satu. Seperti yang kita ketahui, pada Pemilu 2004 kader Partai Golkar, Jusuf Kalla, "hanya" menempati tokoh nomor dua di pemerintahan. Ketiga, banyaknya persamaan di

antara keduanya sehingga sangat dimungkinkan akan timbul kecocokan yang mantap pada pasangan ini.

CITA ADATI EKA RUSMANA  
Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Foto:  
Dok

Halaman B

P U S A T I N F O R M A S I K O M P A S  
Palmerah Selatan 26 - 28 Jakarta, 10270  
Telp. 5347710, 5347720, 5347730, 5302200  
Fax. 5347743  
=====

KOMPAS Jawa Tengah, Jumat, 30-01-2009. Halaman: 7

Bisnis  
EKONOMI MICE DI KOTA SOLO MENINGKAT

Solo, Kompas

Hotel-hotel di Kota Solo dari kelas berbintang hingga melati penuh selama beberapa hari terakhir dengan digelarnya Rapat Kerja Nasional PDI-P. Kegiatan yang melibatkan lebih dari 1.300 orang ini juga mendongkrak penjualan makanan, minuman, penggunaan jasa transportasi, dan oleh-oleh.

Di The Sunan Hotel yang menjadi lokasi acara, dari 127 kamar yang ada, sebanyak 114 kamar digunakan peserta rakernas. Peserta lainnya menghuni berbagai hotel lainnya di Kota Solo. Pemesanan dilakukan sebulan sebelum acara. Kamar-kamar hotel dihuni peserta minimal dua hari.

"Hunian kami penuh 100 persen pada 26-30 Januari, sedangkan ruang pertemuan penuh pada 27-28 Januari bersamaan dengan jadwal rakernas. Restoran juga penuh. Begitu pula coffee lounge yang penjualannya naik, dari Rp 2 juta menjadi Rp 5 juta per hari," kata Public Relations Manager The Sunan Hotel Retno Wulandari, Kamis (29/1). GV

Tahun lalu, Kota Solo juga menjadi tuan rumah beberapa acara berskala nasional dan internasional, antara lain musyawarah nasional Apeksi, Konferensi Kota-kota Pusaka Dunia, kongres nasional arkeologi, dan pustakawan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Solo Soebandono mengatakan, penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional memang mendongkrak tingkat hunian hotel, terutama hotel berbintang empat dan lima. "Namun, secara keseluruhan tingkat hunian hotel masih fluktuatif," katanya.

Wali Kota Joko Widodo mengharapkan Kota Solo menjadi salah satu kota tujuan utama meeting, incentive, conference, exhibition (MICE) di Indonesia setelah Jakarta dan Bali.

Menurut Retno dan Soebandono, upaya Solo untuk memperkuat citranya sebagai kota MICE mulai bergaung. Namun, masih ada kendala dalam pengembangannya, antara lain keterbatasan rute penerbangan. (eki)

Halaman 6



## Mega Dekati Tiga Tokoh



**Silaturahmi Politik:** Mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso (kiri), bersama Sekjen PDIP, Pramono Anung (kanan) serta Suami Megawati, Taufik Kiemas usai melakukan pertemuan tertutup dengan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu (21/1). Bang Yos diundang oleh PDIP untuk menghadiri Rakernas PDIP 27-29 Januari mendatang di Solo, Jawa Tengah.

### Lima nama cawapres sudah dikantongi PDIP

JAKARTA — Calon Presiden (capres) dari PDIP, Megawati Soekarnoputri, melakukan pendekatan dengan tiga tokoh nasional. Pertemuan mereka memunculkan spekulasi terkait cawapres Megawati.

Megawati, Rabu (21/1), mengundang mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X. Mereka diundang makan bubur di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Tidak itu saja, selepas Megawati bertemu dengan dua tokoh daerah itu, dua tokoh kunci PDIP, Taufik Kiemas (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP) dan Pramono Anung (Sekjen DPP PDIP), menyambangi mantan Ketua MPR, Amien Rais. Mereka bertemu di kediaman Amien Rais di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.

Kepada wartawan, Sultan, Sutiyoso, maupun Amien Rais, membantah spekulasi pertemuan itu membicarakan masalah cawapres. Pengakuan mereka, pertemuan mereka hanya silaturahmi biasa. Tidak ada pembicaraan mengenai pemilu legislatif maupun pilpres.

Setelah hampir dua jam berada di dalam rumah Megawati, Sultan yang keluar sekitar pukul 11.00 WIB, menuturkan, Megawati berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PDIP. Kata Sultan, Megawati mengundangnya untuk hadir di Rakernas PDIP, di Solo, Jawa Tengah.

"Saya hanya diundang untuk datang ke Rakernas (PDIP) tanggal 27-28 besok. Ya saya bersedia, begitu saja," ungkap Sultan. Ia menampik ada pembicaraan masalah cawapres dalam pertemuan itu.

Seperti juga Sultan, Sutiyoso, mengatakan, kedatangannya hanya untuk

menerima undangan Megawati dalam perhelatan Rakernas PDIP. Selain itu, lanjut Sutiyoso, hubungan emosional antara dirinya dan Megawati memang sudah terjalin erat.

Di tempat terpisah, Amien Rais menjelaskan, pertemuannya dengan Taufik Kiemas dan Pramono Anung, yang berlangsung hampir satu jam, terfokus pada pembicaraan kondisi politik nasional dan dunia. "Termasuk soal krisis global yang saat ini sedang terjadi," kata Amien.

Dalam pertemuan itu, Amien juga menyarankan, kalau Megawati ingin mendapat dukungan rakyat, hal yang harus dilakukannya adalah mengubah konsep kebijakan ekonomi ke arah program-program yang lebih konkret.

"Ibu Megawati harus menawarkan program-program ekonomi yang lebih konkret untuk rakyat, dan meninggalkan kebijakan ekonomi SBY yang mengandalkan kekuatan korporasi asing," ungkap Amien.

### Lima nama

Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung, menjelaskan, sejauh ini partai berlambang kepala banteng tersebut sudah mengantongi lima kandidat cawapres Megawati. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid, Sutiyoso, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Akbar Tandjung, dan Prabowo.

Megawati sudah melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan semua kandidat cawapres, kecuali Hidayat Nur Wahid. Untuk Hidayat Nur Wahid, kata Pramono, pembicaraan dilakukan melalui pendekatan partai. Ini dilakukan karena PKS dinilai sebagai partai yang menjalankan sistem komando bertingkat dan kolektif.

"Untuk Prabowo, Ibu sudah bertemu tiga kali, sedangkan Sultan secara ideologis punya banyak kesamaan, walaupun semuanya ini belum diputuskan," jelas Pramono. ■ ade



Idian : 021 791 84744  
 Tip : 021 791 84746  
 Faks : 021 791 1169  
 e-mail : bkr@republikka.co.id

Rp 2.900 / 28 Halaman  
 LUAR P. JAWA Rp 3.500 DITAMBAH ONGKOS KRIM  
**RABU 28 JANUARI 2009**  
 1 SAFAR 1430 H  
 NOMOR 023 / TAHUN KE-17

# REPUBLIKA

MAHAKA MEDIA

## SBY-Mega 'Debat' Ekonomi

**Presiden menyatakankan perekonomian so far so good.**

SOLO — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat 'perdebatan' soal ekonomi Indonesia. Meski dalam kesempatan terpisah, keduanya menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi Indonesia terkini.

Megawati kembali mengkritik pemerintahan Kali ini, mantan presiden itu menilai, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tak memenuhi janji kampanye yang mereka sampaikan pada Pemilu 2004. "Saya sangat berharap pemerintah jangan menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak, yoyo. Naik-turun, terlepas ke sana-kemari. Terlihat indah, tapi pada dasarnya membuat rakyat tak menentu hidupnya," kata Mega pada pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TV FDIIP di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/1).

Pada Rakernas itu hadir sejumlah tokoh. Tapi, dari lima calon wakil presiden (cawapres) yang disebut-sebut sebagai pendamping Mega, hanya tiga yang hadir, yaitu Sutiyoso, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Akbar Tandjung. Sedangkan, Prabowo Subianto dan Hidayat Nur Wahid tak hadir.

Sebelumnya, Megawati juga melemparkan beberapa kritiknya. Dia antara lain menyebut pemerintahan SBY seperti sedang menari poco-poco, tebar pesona, dan janji setinggi langit tapi capaian seakali bukti.

Menurut Megawati, persoalan utama bangsa ini adalah stabilitas harga serta tinjauan kemiskinan dan pengangguran.

Akibatnya, kata dia, Indonesia makin jauh dari cita-cita mulia, yaitu keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dia antara lain membandingkan kenaikan APBN 2004 dan 2008 yang menurutnya hasil pembangunannya tak sepadan dengan kenaikan; kenaikan anggaran kemiskinan yang menurutnya tak mengurangi kemiskinan secara signifikan dan inflasi yang membuat harga tak terjangkau.

### KRITIK DAN KLAIM

Calon presiden PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kembali mengkritik kondisi ekonomi pada kesempatan di Solo, Selasa (27/1). Di Malang, pada hari yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai ekonomi bangsa masih baik.

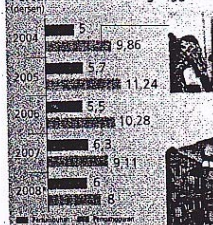


**SBY**  
 "Perekonomian Indonesia selama ini masih dinilai lebih baik, ketimbang negara lain."

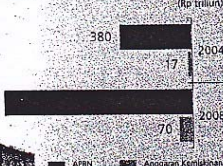


**Megawati**  
 "Saya sangat berharap pemerintah jangan menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak, yoyo."

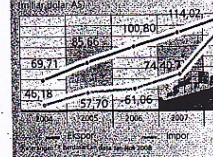
#### Pertumbuhan dan Pengangguran



#### Anggaran Negara dan Kemiskinan



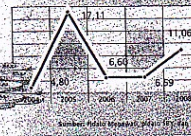
#### Ekspor dan Impor



#### Jumlah Orang Miskin



#### Inflasi (persen)



"Berdasar data BPS, orang miskin pada 2004 adalah 36 juta orang dan pada 2008 adalah 35 juta orang... Saya sebut (sumber) data dari mana, agar tidak dikritik PDIP hanya suduzon," kata Mega.

Penurunan BBM pun dinilainya selangkah hati, karena hanya ingin mendapat simpati, bukan menyelesaikan masalah daya beli masyarakat atau tujuan kesejahteraan. "Sekali lagi saya katakan hanya...," kata Mega.

Mega yang di era pemerintahannya sering dikritik melakukan obral aset, mengkritik penurunan kepemilikan lokal atas usaha di Indonesia. Mengutip data Asosiasi Pengusaha Indonesia, Mega mengatakan, pada

2002-2004, kepemilikan lokal masih 74 persen. Tapi, pada 2005-2007, menjadi 22 persen. "Miris. Terjadi liberalisasi berlebihan," katanya.

#### Tantangan

Sementara itu, saat menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Brawijaya, Presiden Yudhoyono memaparkan perkembangan perekonomian Indonesia sejak tahun 1998. Presiden juga menyebutkan berbagai tantangan di masa awal pemerintahannya. Mulai dari bencana alam, ketidakstabilan harga minyak bumi, hingga ancaman krisis keuangan global.

"Apabila ditanya tahun mana yang berat dalam masa pemerintahan saya, saya katakan semua tahun berat, karena memang selain harus memulihkan dampak krisis 10 tahun lalu," kata Presiden. Sementara itu, lanjut dia, tantangan baru terus berdatangan.

Presiden mengakui krisis keuangan global membuat pertumbuhan ekonomi membuat tahun 2009 akan menurun. Tapi, dia mengatakan banyak pihak yang menilai kondisi Indonesia lebih baik. Dia mengutip sebuah majalah internasional yang menulis bahwa kondisi ekonomi Indonesia 'so far so good' alias masih baik-baik saja.

Presiden pun mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Antara lain, memperluas lapangan kerja; meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan energi; serta perbaikan kualitas pemerintahan.

**Rakyat akan lebih suka pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah.**

Anas Urbaningrum  
 Ketua Partai Demokrat

lain, memperluas lapangan kerja; meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan energi; serta perbaikan kualitas pemerintahan.

Presiden juga menekankan perlunya kemandirian. Perekonomian Indonesia di masa depan, hendaknya tak bergantung pada ekspor, tak bergantung pinjaman luar negeri, tak larut dalam perdebatan ideologi, serta menciptakan kemandirian pangan, energi, dan pertahanan. Presiden juga mengajak pengusaha tak mem-PHK buruh. "Mari kita lindungi yang miskin, sektor riil, jangan ada PHK."

Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai pernyataan Mega — bahwa SBY-JK menjadikan rakyat seperti yoyo — merupakan tanda bahwa ketua umum PDIP itu panik. Palsunya, kata dia, kebijakan SBY-JK ternyata populistis.

"Sebagai pimpinan partai yang mengaku pro-uang cilik, mestinya berani mengopres kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat kece karena analisis populis. Larutan pemerintah naik-lantar-harga BBM turun, lantas pan dan memproduksi penilai yang tidak tepat," kata Anas. Anas menilai rakyat akan lebih suka pemerintah yang bekerja keras dan mendatangkan faedah ketimbang oposisi yang 'bekerja keras' memproduksi kalimat-kalimat ibarat seperti poco-poco dan yoyo. ■ [ana@si/haq/eds/](mailto:ana@si/haq/eds/)





**Jumpa Pers Rakernas:** Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, (duduk tengah) beserta Pramono Anung dan Puan Maharani, memberikan keterangan kepada media, di lokasi Rakernas PDIP di Solo, Jateng, Selasa (27/1). Mega mengatakan, siapapun masih berpeluang untuk menjadi cawapres dari PDIP.

# Cawapres PDIP Sama Kuat

**Rakernas PDIP belum pasti mengumumkan cawapres PDIP**

SOLO— Dukungan terhadap sejumlah tokoh untuk dijadikan cawapres pendamping capres PDIP, Megawati Soekarnoputri, masih cukup seimbang. Kemungkinan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP belum mengumumkan cawapres PDIP.

Sekjen PDIP, Pramono Anung Wibowo, mengatakan, sejauh pantauan DPP PDIP, sebagian perwakilan dari kawasan Indonesia Timur mengusung Sultan Hamengku Buwono X sebagai calon pendamping Megawati. Tetapi, sejumlah daerah mengusulkan Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, Hidayat Nur Wahid, dan Sutiyoso. Sementara Wiranto mendapat dukungan dari basis PDIP di Gorontalo.

Penentuan siapa cawapres PDIP, kata Pramono, akan tetap melihat usulan daerah tersebut. Hak menyampaikan kedaulatan, kata dia, ada pada pengurus cabang dan daerah. Hasilnya akan disampaikan dalam tabulasi kepada ketua umum.

"Apakah (cawapres) akan diumumkan besok (hari ini—Red), DPP akan bentuk tim

khusus mengkaji nama-nama itu, tergantung besok," kata Pramono, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/1).

Pramono menjelaskan, telah dibentuk tim khusus yang akan membahas hasil tabulasi masukan dari daerah dan cabang. "Besok (hari ini—Red) persidangan khusus membahas kriteria cawapres dan nominasi," ujar Pramono. Ini akan memberi kesempatan kepada cabang dan DPD untuk menyampaikan pendapat. Termasuk menyampaikan hasil survei internal partai.

Pramono mengakui, masukan dari daerah dan cabang sangat penting karena mereka yang memantau langsung kondisi lapangan dan masyarakat. Sementara itu, Megawati belum memberikan sinyal cawapres yang diinginkannya. Ketua Umum DPP PDIP ini justru membuka pernyataan kemungkinan munculnya nama lain.

Usai pembukaan, Megawati mengatakan, rakernas ini hanya akan mempertimbangkan aspirasi dari DPD dan DPC PDIP mengenai cawapres yang akan mendampingi dirinya. "Di rakernas ini bisa saja muncul nama, tetapi apakah akan diputuskan atau belum, tergantung dari rakernas ini," kata dia.

Dari lima nama cawapres yang disebut menjadi incaran PDIP, hadir Sutiyoso, Sri

Sultan, dan Akbar Tandjung. Sementara Prabowo Subianto dan Hidayat Nur Wahid tak datang. Sekalipun Prabowo tidak hadir, namun Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Suhardi, hadir di sana.

Megawati membentah kehadiran Sultan, Sutiyoso, dan Akbar Tandjung terkait erat dengan pencalonan cawapres. "Semua juga tahu yang datang ke sini tidak ada satu pun *ho* yang punya keinginan jadi cawapres. Mereka menyatakan dirinya adalah capres," kata dia.

### PKS tidak bicara

Di tempat terpisah, Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menegaskan, dirinya maupun partai, tidak pernah diajak bicara oleh PDIP tentang cawapres Megawati. "Sampai sekarang belum ada pembicaraan soal cawapres PDIP," kata Tifatul. Karena itu, Tifatul merasa heran mengapa orang luar ramai membicarakan potensi mantan ketua umum DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, berpasangan dengan Megawati.

Jika hasil Rakernas PDIP memutuskan Hidayat Nur Wahid menjadi pendamping Megawati, PKS akan menjawab pinangan PDIP dengan mekanisme partai. PKS akan menindaklanjuti dengan menggelar sidang Majelis Syuro PKS.



# REPUBLIKA

MAHAKA MEDIA

## Cawapres PDIP Bertambah

### PDIP akan menentukan nama cawapres pada rakernas berikut.

SOLO — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan berakhir antuklimaks. Rencana mengerucutkan nama calon wakil presiden (cawapres) dari lima nama menjadi tiga, gagal tercapai. Rakernas yang ditutup Rabu (28/1) malam, di Solo, malah memproduksi lebih banyak nama cawapres, yaitu 11.

Sebelum rakernas dimulai, ada lima nama cawapres yang disebut-sebut akan mendampingi Megawati Soekarnoputri bertarung dalam pemilu presiden tahun ini. Mereka adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Prabowo Subianto, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Sutiyoso.

Tapi, sebelum rakernas ditutup, tujuh nama lainnya muncul, yaitu Surya Paloh, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Wiranto, ketua umum Partai Hanura, Fadel Muhammad, gubernur Gorontalo; Sutanto, mantan kapolri; Ryamizard Ryacudu, mantan KSAD; dan Djoko Santoso, panglima TNI.

Dalam rapat koordinator wilayah (korwil), DPD-DPD provinsi memberikan dukungannya kepada masing-masing calon. Hasilnya, Sultan didukung 33 provinsi; Prabowo (28); Hidayat (15); Surya Paloh (14); Akbar Tandjung (12); Sutiyoso (5); Wiranto (5); Fadel (5); dan

Ryamizard (5).

Saat menutup rakernas pada pukul 22.00 WIB, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa PDIP baru akan menentukan cawapres pada rakernas berikutnya. "Rakernas yang akan datang menjadi puncaknya. Akan saya beri tahu siapa yang akan menjadi cawapres," katanya.

### Sebelum pemilu

Kapan dan di mana rakernas berikutnya digelar, belum ditentukan. Penentuannya, kata Megawati, bergantung evaluasi situasi 70 hari menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2009. "Masih ada waktu sebelum pemilu legislatif," katanya.

Dalam jumpa pers usai penutupan rakernas, Megawati mengatakan bahwa salah satu alasan rakernas belum menyebutkan nama cawapres adalah karena nama yang muncul belum satu pun yang mendeklarasikan kesediaan menjadi cawapres. "Semua masih mendeklarasikan diri sebagai capres," katanya.

Karena itu, kata Megawati, rakernas ini dalam rekomendasinya meminta dibentuk satu tim yang akan mendampingi untuk melihat dan memperhatikan berlandaskan kriteria yang ditetapkan dari rakernas ini.

"Dengan demikian, sebagai ketua umum, saya dapat menilai dan membuat pilihan dengan hati-hati, lebih matang, karena pendamping saya itu tentunya harus yang bisa bekerja sama kalau saya diizinkan jadi presiden," papar Megawati.

Megawati tak menutup kemungkinan nama cawapres berkembang lagi. "Masih ada kemungkinan banyak orang (menjadi cawapres PDIP)," kata Megawati.

Selain diumumkan dalam rakernas berikutnya, Megawati mengatakan, cawapres bisa diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) PDIP. Setiap orang, kata dia, bisa menyampaikan aspirasi. "Tapi, seluruh keputusan dan tanggung jawab ada di DPP yang diketuai ketua umum," tegas dia.

Megawati menyatakan, PDIP tidak khawatir kehilangan momentum. "Jangan terlahireverestimate pada orang-orang itu (yang muncul dalam ajang rakernas—Red). Kriteria akan membuka itu. Setelah ada kriteria, masyarakat akan berpikir bisa saja menyesuaikan dengannya," kata dia.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas tidak menampik kemungkinan Syafiq Maarif dan Faisal Basri masuk tim kecil hasil rekomendasi rakernas ini. "Pekan depan, kami sudah mulai jalan untuk berkomunikasi dengan para kandidat cawapres ini, dengan tim kecil yang direkomendasikan rakernas ini," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Megawati menyatakan rakernas IV PDIP tidak hanya membahas soal cawapres. "Ada soal koalisi dan sebagainya," kata dia.

Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, di DPR menyatakan, partainya tak mematok syarat khusus untuk koalisi itu. "Kami komunikasi dengan semua partai. Termasuk Partai Demokrat," kata dia. ■

### 5 CAWAPRES PENDAMPING MEGAWATI

#### SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO X

Usia: 63 tahun  
Jabatan: Gubernur Di Yogyakarta, Ketua DPD Partai Golkar Di Yogyakarta.  
Jabatan sebelumnya: Calon presiden: Dicalonkan Partai Republik Nusantara (RepublikaN).  
Jumlah penguas: 33 Provinsi



#### PRABOWO SUBIANTO

Usia: 58 tahun  
Jabatan: Ketua Umum HKTI (2004-2009); pengusaha; pendiri Partai Gerindra.  
Jabatan sebelumnya: Danjen Kopassus, Panglima Kostrad, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.  
Calon presiden: Dicalonkan Partai Gerindra  
Jumlah penguas: 28 Provinsi



#### HIDAYAT NUR WAHID

Usia: 49 tahun  
Jabatan sekarang: Ketua MPR (2004/2009)  
Jabatan sebelumnya: Presiden PKS  
Calon presiden: —  
Jumlah penguas: 15 Provinsi



#### SURYA DHARMA PALOH

Usia: 57 tahun  
Jabatan: Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar  
Jabatan sebelumnya: Calon presiden: —  
Jumlah penguas: 14 Provinsi



#### AKBAR TANDJUNG

Usia: 64 tahun  
Jabatan sekarang: Ketua Dewan Pembina Barisan Indonesia (Barindo)  
Jabatan sebelumnya: Ketua DPR, ketua Umum Partai Golkar.  
Calon presiden: —  
Jumlah penguas: 12 Provinsi



# Golkar-PKS Lirik Capres Alternatif

**Jika Mega dan SBY mengambil cawapres nonparpol, munculnya capres alternatif terbuka lebar.**

JAKARTA — Sengitnya persetujuan dua calon presiden (capres), Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membuka peluang munculnya capres alternatif. Partai Golkar (PG) dan PKS bersiap menyongsong peluang yang terbuka tersebut.

"Ada pikiran pribadi. Saya usulkan ke internal pimpinan agar Golkar juga mengelusius momen penting ini untuk tampilan calon alternatif," kata Ketua Umum DPP Masyarakat Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Priyo Budi Santoso, Rabu (28/1). MKGR merupakan ormas pendiri PG.

Priyo yang juga ketua Fraksi PG DPR memaparkan, posisi PG cukup dilematis. PG menghormati kesantunan politik antara SBY dan JK yang statusnya masih merupakan pasangan pemimpin negara. Di sisi lain, perkembangan politik berlangsung cepat.

"Apa elok secara politik

yang mengerucut bahwa *head to head* akan bertanding SBY dan Mega. Saya tergelitik. Golkar kan partai terbesar, apa dalam posisi *wait and see*," ungkap Priyo.

Priyo mengatakan, sebagian besar anggota Partai Golkar masih mendukung duet SBY-JK. Hanya, kalau ada poros alternatif, Golkar siap saja untuk memimpin. "Parpol-parpol tengah belum jelas mengarah ke mana, Blok M (Megawati) atau Blok S (SBY). Kalau Golkar memutuskan untuk memilih opsi mana, bukan pekerjaan mudah."

Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq, memperkirakan akan muncul capres alternatif. "Berdasarkan pengalaman 2004, rasanya tahun 2009, kecil kemungkinan hanya dua pasangan calon. Nanti, sangat mungkin munculnya kekuatan atau poros alternatif. Puncaknya setelah pileg (pemilu legislatif)."

Apabila ada poros alternatif, kata Mahfudz, PKS sudah mengeluarkan delapan kepemimpinan nasional sebagai respons kemungkinan ke depan. "PKS siap jadi loko, siap persis di belakang loko, atau di belakangnya," kata Mahfudz.

Mahfudz menilai, sikap kesantunan politik PG memang baik. Namun, kalau terlalu santun, justru akan menjadi bumerang bagi PG. Menurutnya, akan banyak hak-

hak PG yang akan terampas.

Mengenai formulasi capres alternatif yang kemungkinan akan muncul, Mahfudz mengatakan, bisa berbasis parpol atau capres. Artinya, parpol akan berkoalisi dan melancarkan capres/cawapres alternatif atau akan ada figur yang kuat, yang akan memersatukan kekuatan partai menentang untuk mengusungnya. "Saya lebih berpikir akan lebih kokoh poros alternatif ini adalah berbasis partai," ungkapnya.

## Kecewa

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, melihat bahwa pertunjukan sengit Blok M dan Blok S sudah menjadi persetujuan kasar. "Kita butuh kehadiran orang lain untuk memberi warna lain dari pertarungan. Siapa pemimpin yang atasi persoalan mendasar? Tinggal sekarang capres dan parpol mana yang selaras dalam menjawab persoalan itu."

Di tempat terpisah, Sekjen DPP PPE Irgan Chairul Mahfiz, melihat peluang capres alternatif masih terbuka. Apalagi kalau Megawati atau SBY mengambil cawapres bukan dari unsur parpol. Parpol menentang akan kecewa kalau capres lebih memilih cawapres nonparpol.

"Namun, munculnya capres alternatif akan tergantung pada hasil pemilu legislatif." ■ wed/djo



# Sultan Disarankan Mundur Saja

**Keluarnya Sultan diyakini tidak akan mempengaruhi suara Partai Golkar.**

JAKARTA — Demi menjaga etika politik, Sultan Hamengku Buwono X disarankan mengundurkan diri dari kepemimpinan Partai Golkar (PG). Kehadiran Sultan pada Rakernas FDIIP dianggap bisa menimbulkan polemik di tubuh PG.

Direktur Eksekutif Lembaga Riset Informasi, Johan O Silalahi, menyatakan, Sultan memang mempunyai hak untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai capres atau cawapres.

Namun, untuk menegakkan etika berorganisasi, Sultan disarankan untuk mengundurkan diri.

"Kehadiran Sultan di Rakernas PDIP memang dapat menimbulkan polemik internal PG," kata Johan, Rabu (28/1). Pasalnya, lanjut Johan, masyarakat mengetahui bahwa Sultan itu merupakan salah seorang pengurus teras PG.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago, berpendapat yang sama. Ia menyarankan Sultan mundur untuk memberi contoh kepada pengurus partai lainnya. Selama ini, parpol banyak dihuni orang-orang yang tak mempunyai moralitas baik, sehingga dengan mudahnya mengkhianati partainya sendiri.

"Memberikan nilai-nilai baru bahwa kalau seseorang ingin bergabung atau menjadi capres dari partai lain, ya, mengundurkan diri," imbuhnya.

Kader PG, yang mengikuti langkah Sultan mendeklarasikan maju capres, Yuddy Chrisandi, menganggap tidak ada yang dilanggar oleh Sultan. Menurut Yuddy, kehadiran Sultan karena memenuhi undangan.

"Seharusnya Golkar bangga ada kadernya yang diperhitungkan dan dihormati oleh kekuatan di luar Golkar sendiri," ungkap Yuddy. Sangat naif kalau ada elite PG yang mengeluarkan ancaman.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Yogyakarta, Subardi, mengatakan, jika Sultan menjadi cawapres, meru-

pakan kebanggaan bagi Yogyakarta. "Jangan buru-buru memvonis Sultan pengkhianat."

## Tidak berpengaruh

Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PG, Jeffrie Geovanie, mengatakan, perolehan suara partainya tidak bergantung pada figur atau perseorangan. "Saya masih percaya Golkar tidak dibangun atas individu, tetapi dibangun sebagai sebuah institusi," kata Jeffrie.

Perolehan suara PG di Yogyakarta, menurut dia, tidak akan serta-merta turun jika Sultan keluar dari PG. "Saya yakin perolehan suara Golkar tak akan goyah begitu saja," kata dia.

Meski demikian, Jeffrie meminta persoalan Sultan diperhi-

tungan dengan matang. Harus diperhitungkan untung ruginya keberadaan Sultan bagi PG. "Pendapat Pak Muladi dan Pak Agung (Agung Laksono) tetap harus dihormati, tapi sebaiknya ada pembicaraan intensif di DPP (Golkar)."

Ketua DPP PG, Priyo Budi Santoso, menganggap, Sultan kurang bersabar. Jika menginginkan maju sebagai capres atau cawapres, semestinya Sultan bersabar. "Walau PG tak ada konvensi, kan penentuan ada di rakernas," ungkap Priyo.

Bisa saja Sultan jadi salah satu andalan di PG. "Andai Sultan sedikit bersabar dan tak tergesa-gesa," ungkapnya. Langkah Sultan telah membuat munculnya keraguan atas tanggung jawab Sultan terhadap PG. ■ *dj/any/wed*